Menatap masa depan: seorang bapak menggendong anak perempuannya di daerah yang pernah mengalami penggusuran di Jakarta Utara
Foto:Tiara Audina/Antropologi UI

MENUJU INDONESIA YANG LEBIH SETARA

Laporan Ketimpangan Indonesia

infid International NGO Forum on Indonesian Development

OXFAM

Menatap masa depan: seorang bapak menggendong anak perempuannya di daerah yang pernah mengalami penggusuran di Jakarta Utara. Foto:Tiara Audina/Antropologi UI

MENUJU INDONESIA YANG LEBIH SETARA

Bagaimana pemerintah melakukan tindakan untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok lainnya

Dalam dua dekade terakhir, di Indonesia ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok yang lain mengalami peningkatan yang lebih cepat dibanding dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 100 juta penduduk termiskin. Ketimpangan tersebut, tidak hanya memperlambat pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial. Presiden Joko Widodo telah menjadikan penurunan ketimpangan sebagai prioritas utama pada tahun 2017. Hal ini dapat tercapai dengan memberlakukan upah hidup layak (*living wage*) bagi semua pekerja, meningkatkan belanja publik, serta memastikan perusahaan besar dan individu kaya membayar pajak secara adil.

www.oxfam.org

infid International NGO Forum on Indonesian Development

OXFAM

RINGKASAN

Sejak tahun 2000, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat cukup signifikan, dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 40 persen menjadi 8 persen. Walau demikian, manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut tidak tersebar secara merata. Dalam 20 tahun terakhir, di Indonesia ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok yang lain mengalami peningkatan yang jauh lebih cepat dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara.[1]

Indonesia berada pada peringkat keenam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Pada tahun 2016, sebanyak 1 persen individu terkaya dari total penduduknya menguasai hampir separuh (49 persen) total kekayaan. Jumlah miliarder mengalami peningkatan dari hanya satu orang pada tahun 2002 menjadi 20 orang pada tahun 2016, yang kesemuanya adalah kaum laki-laki. Pada tahun 2016, kekayaan kolektif dari empat miliarder terkaya tercatat sebesar $25 miliar, lebih besar dari total kekayaan 40 persen penduduk termiskin – sekitar 100 juta orang. Hanya dalam waktu sehari, orang Indonesia terkaya dapat meraup bunga dari kekayaannya lebih dari seribu kali lipat jumlah pengeluaran rakyat Indonesia termiskin untuk kebutuhan dasar mereka selama setahun penuh. [2] Jumlah uang yang diperoleh setiap tahun dari kekayaannya cukup untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ketimpangan khususnya di daerah perkotaan semakin meningkat sehingga menjadi ancaman bagi masalah ketimpangan di masa depan karena Indonesia mengalami pertumbuhan urbanisasi tertinggi di kawasan Asia. Selain itu, tingkat ketimpangan antara daerah pedesaan dan perkotaan juga tinggi.

Semakin lebarnya ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok lain merupakan ancaman yang serius bagi kesejahteraan Indonesia di masa mendatang. Jika masalah ketimpangan ini tidak ditangani, pengentasan kemiskinan menjadi lebih sulit, dan ketidakstabilan sosial akan meningkat. Penelitian juga menunjukkan ketimpangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ini dapat memperpanjang perlambatan pertumbuhan Indonesia yang terjadi baru-baru ini. Sebaliknya, melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan dapat mengangkat jutaan orang keluar dari jurang kemiskinan, menciptakan masyarakat yang lebih kohesif, ikut berkontribusi dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan yang merata dalam jangka panjang, dan membantu Indonesia untuk mencapai serangkaian target dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Penyebab ketimpangan di Indonesia sangat kompleks dan berlapis, mulai dari penyebab struktural hingga pilihan kebijakan yang lebih spesifik. Setelah melewati masa pertumbuhan yang relatif lebih merata, fundamentalisme pasar yang diperkenalkan kepada perekonomian Indonesia pada saat krisis keuangan tahun 1997 telah mendorong perekonomian yang memungkinkan mereka yang berada di atas untuk meraup bagian keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini berakibat pada meningkatnya *political capture* karena mereka yang berada di atas mampu memanfaatkan pengaruh yang dimiliki karena kekayaannya untuk mengubah aturan yang dapat menguntungkan mereka, dengan mengorbankan

orang banyak, sehingga ketimpangan semakin mengakar. Ketidaksetaraan gender yang merupakan salah satu bentuk tertua dari ketimpangan, dapat ditemui dengan mudah di Indonesia, dan berperan sebagai penyebab sekaligus akibat dari ketimpangan ekonomi.

Upah murah dan pekerjaan yang tidak memberikan rasa aman bagi mereka yang berada di bagian paling bawah semakin memperparah masalah ketimpangan sehingga pekerja merasa tidak berdaya untuk mengangkat diri mereka dari jurang kemiskinan. Ketimpangan akses antara pedesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur seperti jaringan listrik dan jalan yang berkualitas, semakin memperlebar ketimpangan spasial, dan pemusatan penguasaan lahan oleh perusahaan besar dan individu kaya menyebabkan manfaat yang diperoleh dari hak kepemilikan lahan hanya menumpuk pada mereka yang berada di bagian teratas dengan mengorbankan masyarakat yang lain.

Sistem perpajakan telah gagal memainkan peran pentingnya dalam mendistribusikan kekayaan, dan masih jauh dari potensi pencapaiannya dalam meningkatkan pendapatan untuk membiayai layanan publik guna mengurangi ketimpangan. Pemungutan pajak di Indonesia sebagai persentase dari PDB menempati peringkat terendah kedua di Asia Tenggara. Menurut proyeksi IMF, potensi penerimaan pajak di Indonesia sebesar 21,5 persen. Jika potensi ini terpenuhi maka anggaran kesehatan dapat meningkat sembilan kali lipat. Basis pajak di Indonesia juga merupakan korban dari para penghindar pajak. Pada tahun 2014, dana sebesar $100 milyar mengalir dari Indonesia ke kawasan suaka pajak *(tax haven)*, yang setara dengan hampir 10 kali anggaran pendidikan pada tahun tersebut. Penerimaan pajak diperlukan untuk membiayai layanan publik yang vital untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga. Meskipun pemerintah telah melangkah maju menuju pencapaian jaminan kesehatan untuk semua, masih diperlukan lebih banyak dana untuk menghapus premi asuransi yang memberatkan. Demikian juga, sistem pendidikan di Indonesia mengalami kekurangan dana, masih terdapat hambatan terhadap akses yang sama, sehingga tidak membekali masyarakat dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Kondisi ini membuat jutaan pekerja tidak dapat mengakses pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan bergaji lebih tinggi.

Masyarakat jelas menginginkan agar pemerintah mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan. Sebesar 88 persen dari penduduk Indonesia menganggap upaya untuk mengurangi ketimpangan oleh pemerintah merupakan hal yang mendesak. Hal ini diakui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap masalah ketimpangan sudah mencapai tingkat yang ‘membahayakan’ sehingga upaya untuk menanggulangi masalah ini menjadi prioritas utama bagi pemerintahan pada tahun 2017. Paket ‘Kebijakan Keadilan Ekonomi’ yang baru telah diluncurkan untuk menangani masalah ketimpangan, termasuk berbagai langkah untuk meningkatkan redistribusi lahan, memberlakukan pajak pada spekulan tanah, meningkatkan akses terhadap kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Meskipun berbagai upaya patut dihargai, pemerintah Indonesia semestinya dapat melangkah lebih jauh lagi. Pemerintah khususnya harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan pekerjaan dan upah yang adil bagi sebagian besar penduduk Indonesia, dan menerapkan sistem perpajakan progresif untuk meningkatkan pendapatan yang dapat diinvestasikan ke dalam layanan kesehatan dan pendidikan.

Berbekal tekad politik dan keputusan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat membalikkan keadaan dan memastikan masa depan yang lebih sejahtera dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok yang lain, pemerintah perlu mengambil berbagai tindakan di bawah ini.

Ketimpangan

- Menyusun rencana nasional yang memperlihatkan secara jelas bagaimana menangani masalah ketimpangan, dan mencapai target untuk menurunkan koefisien Gini, termasuk antara daerah perkotaan dan pedesaan.
- Memastikan pemerintah daerah berkomitmen mengurangi ketimpangan.

Pekerjaan dan upah yang adil

- Menyusun *roadmap* untuk memastikan penentuan upah hidup layak, menjamin penerapannya, dan mengkaji gagasan lebih lanjut yang terkait dengan upah hidup layak di tingkat ASEAN.
- Mengatur perusahaan untuk memastikan lebih banyak pekerja yang direkrut berdasarkan kontrak kerja yang pasti.
- Mengurangi ketimpangan upah menurut gender dan menghapus berbagai hambatan terhadap partisipasi perempuan yang setara dalam angkatan kerja. Bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk mendorong norma dan sikap sosial yang positif mengenai pekerjaan perempuan.

Pajak

- Meningkatkan rasio pajak terhadap PDB untuk mencapai potensi pajak Indonesia secara optimal. IMF memperkirakan potensi ini sebesar 21,5 persen. Hal ini dapat dilakukan dengan: 1). menambahkan komponen pajak dengan tarif pajak yang lebih tinggi untuk golongan teratas dari sistem pajak penghasilan perseorangan; 2). mengkaji ulang pajak kekayaan yang bertujuan meningkatkan pajak bumi dan bangunan untuk properti dengan nilai tertinggi, meningkatkan pajak harta warisan dan memperkenalkan pajak kekayaan bersih; serta 3). menyusun rencana aksi nasional untuk menangani masalah penghindaran dan penggelapan pajak.
- Menghindari upaya untuk menuju tarif terendah *(‘race to the bottom’)* untuk pajak penghasilan badan usaha dengan mempertahankan tingkat pajak badan usaha, tidak menawarkan insentif pajak yang merugikan serta menjalin kerja sama di tingkat regional dengan negara-negara anggota ASEAN untuk masalah perpajakan.

Belanja publik

- Melanjutkan upaya yang telah dilakukan untuk memastikan tercapainya jaminan kesehatan universal melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan akses yang merata terhadap layanan kesehatan dengan menghapus seluruh premi untuk layanan kesehatan dan beralih ke sistem kesehatan nasional yang sepenuhnya didanai pajak. Meningkatkan belanja kesehatan dua kali lipat menjadi minimal 2,2 persen dari PDB. Pada tahun-tahun mendatang, berupaya meningkatkan belanja publik untuk kesehatan hingga mencapai minimal 3 persen dari PDB.

- Meningkatkan belanja pendidikan hingga menjadi 4 persen dari PDB dalam jangka pendek. Memperpanjang masa wajib belajar menjadi 12 tahun. Mengkaji ulang berbagai hambatan yang masih menghalangi siswa dan remaja perempuan yang berasal dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan menengah, dan meluncurkan rencana tiga tahun untuk secepatnya mengatasi berbagai hambatan ini.
- Memberikan pelatihan kejuruan dalam porsi yang lebih banyak dan lebih berkualitas dengan meningkatkan pendanaan dari pajak sehingga dapat mengalokasikan 10–20 persen dari anggaran pendidikan untuk pelatihan dan pemagangan.

Gender

- Menganalisis secara sistematis berbagai usulan kebijakan yang terkait dengan dampaknya terhadap kaum perempuan dan anak perempuan. Memperluas proses penganggaran berdasarkan gender dan mendukung organisasi perempuan agar ikut terlibat dalam proses penentuan keputusan tentang belanja publik.
- Mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan gender di semua lapisan masyarakat, termasuk dalam menangani norma-norma sosial yang merugikan, mendukung kepemimpinan dan wewenang pengambilan keputusan di kalangan perempuan, serta mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Sektor swasta juga harus memainkan perannya dalam mengurangi ketimpangan, sedangkan badan usaha harus mengambil berbagai tindakan berikut ini.

- Mengungkapkan data tentang ketimpangan upah berdasarkan gender mereka masing-masing.
- Menjamin akses terhadap peluang kerja yang layak dan aman bagi kaum perempuan
- Merekrut pekerja dengan kontrak kerja yang pasti.
- Mendukung tindakan pemerintah dalam menerapkan upah hidup layak di tingkat nasional dan memberlakukan berbagai kebijakan yang menuju ke arah upah hidup layak.
- Melakukan investasi dalam bentuk keterampilan pekerja untuk memenuhi kebutuhan atas pekerja yang berketerampilan tinggi.
- Memberikan pelatihan *on-the-job*, magang berbayar, dan penempatan kerja, dengan sertifikasi dan pengakuan profesional yang sesuai.
- Melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan agar balai latihan kerja menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

1 KETIMPANGAN EKONOMI EKSTREM DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA

Sejak tahun 2000, perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Meskipun akhir-akhir ini terjadi perlambatan, pertumbuhan PDB rata-rata mencapai lebih dari 5 persen selama periode tahun 2000-2016.[3] Hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan industri jasa, seperti yang terlihat pada Gambar 1. Indonesia relatif berhasil memanfaatkan pertumbuhan ini ke dalam peningkatan pembangunan manusia. Meskipun masih berada dalam kategori menengah untuk pembangunan manusia, dan memiliki nilai IPM yang lebih rendah dari nilai rata-rata untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, Indonesia mampu memperbaiki posisinya dalam indeks IPM antara tahun 2010 dan 2014.[4] Karena itu, jumlah penduduk miskin menurun dari 40 persen pada tahun 2000 menjadi 8 persen pada tahun 2014.

Gambar 1: Pertumbuhan GDP (%)

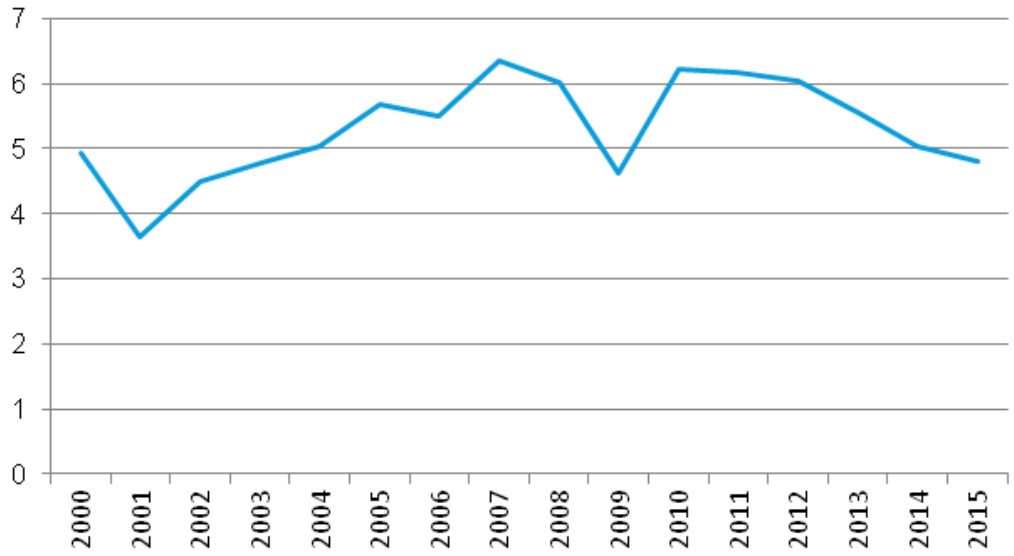

Sumber: Data Bank Dunia.[5]

Dalam 20 tahun terakhir, ketimpangan di Indonesia mengalami peningkatan yang lebih cepat dari negara-negara lain di Asia Tenggara

Walau demikian, manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut belum terbagi secara merata, dan masih banyak yang tertinggal jauh di belakang terutama perempuan. Jika Bank Dunia menggunakan $3,10 atau Rp 40.300 pendapatan per hari per orang sebagai batas kemiskinan, jumlah penduduk miskin akan meningkat menjadi 93 juta (36 persen dari total penduduk).[6] Banyak penduduk miskin yang hidup di atas garis kemiskinan yang membuat mereka rentan jatuh miskin. Pada saat yang sama dengan pertumbuhan ekonomi, jurang antara yang kaya dengan miskin meningkat secara signifikan. Baik koefisien Gini maupun Indeks Palma, meskipun tidak menggambarkan tingkat ketimpangan yang sesungguhnya,[7] menunjukkan kecenderungan meningkatnya ketimpangan selama 20 tahun terakhir, dengan ketimpangan di perkotaan secara konsisten lebih tinggi daripada ketimpangan di pedesaan (Gambar 2 dan 3). Selama periode ini, koefisien Gini Indonesia naik lebih cepat daripada negara-negara lain di Asia Tenggara.[8]

Gambar 2: Koefisien Gini untuk daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia (%)

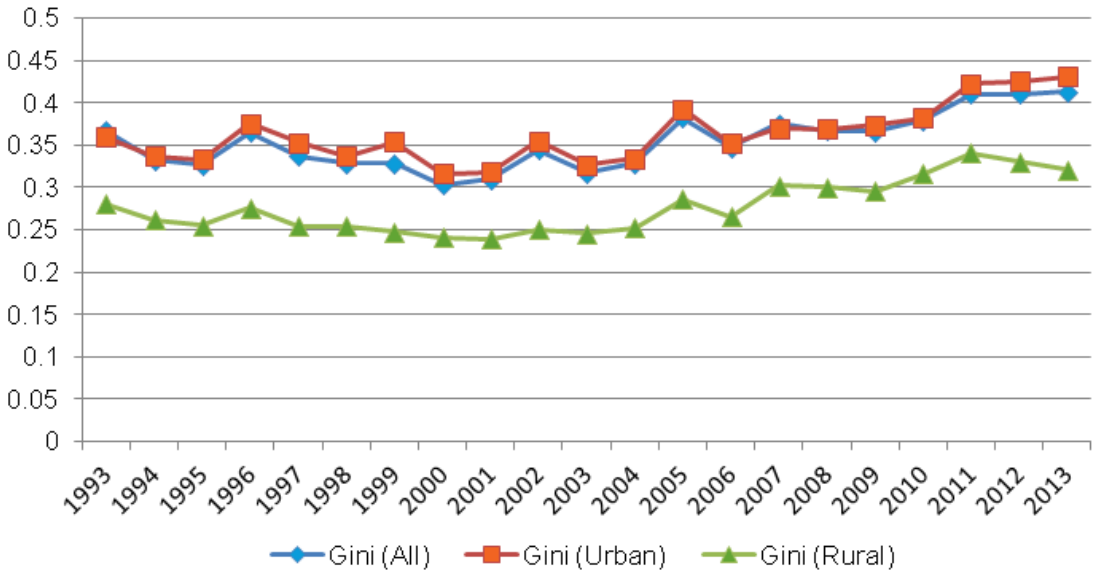

Sumber: A.A. Yusuf, Center for Economics and Development Studies.[9]

Gambar 3: Indeks Palma untuk daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia (%)

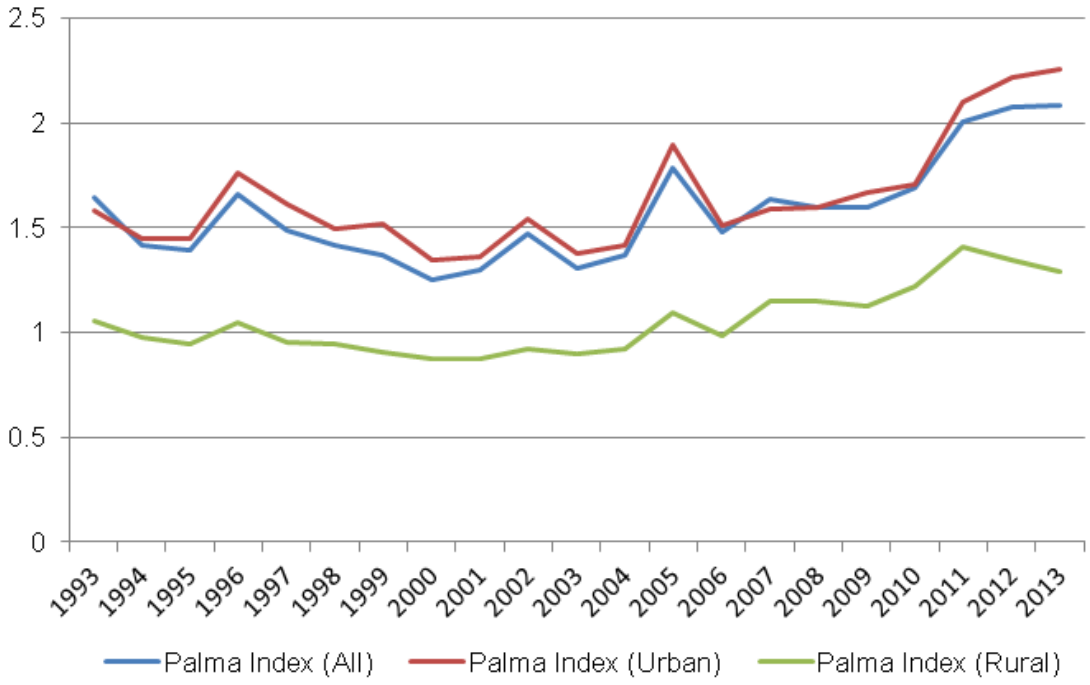

Sumber: A.A. Yusuf, Center for Economics and Development Studies.[10]

Di tingkat daerah, ketimpangan yang terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia, menunjukkan meskipun ketimpangan lebih tinggi di perkotaan, ketimpangan meningkat secara nasional (Gambar 4). Koefisien Gini di 33 dari 34 provinsi di Indonesia meningkat antara tahun 2008 dan 2013, di mana peningkatan koefisien Gini tertinggi sebesar 9 persen terjadi di Sulawesi Utara. Maluku Utara adalah satu-satunya provinsi di mana koefisien Gini mengalami penurunan, meskipun hanya sebesar 1 persen. Ketimpangan yang terjadi terutama di daerah perkotaan di Indonesia telah mengalami peningkatan, di mana saat ini lebih banyak orang yang berada di perkotaan daripada pedesaan. Sepuluh persen orang

terkaya di daerah perkotaan memiliki lebih dari sepertiga total pendapatan Indonesia.[11] Situasi ini menunjukkan adanya risiko ketimpangan di masa depan karena Indonesia mempunyai pertumbuhan urbanisasi tertinggi di Asia.[12]

Gambar 4: Rasio Gini per Provinsi, 2013

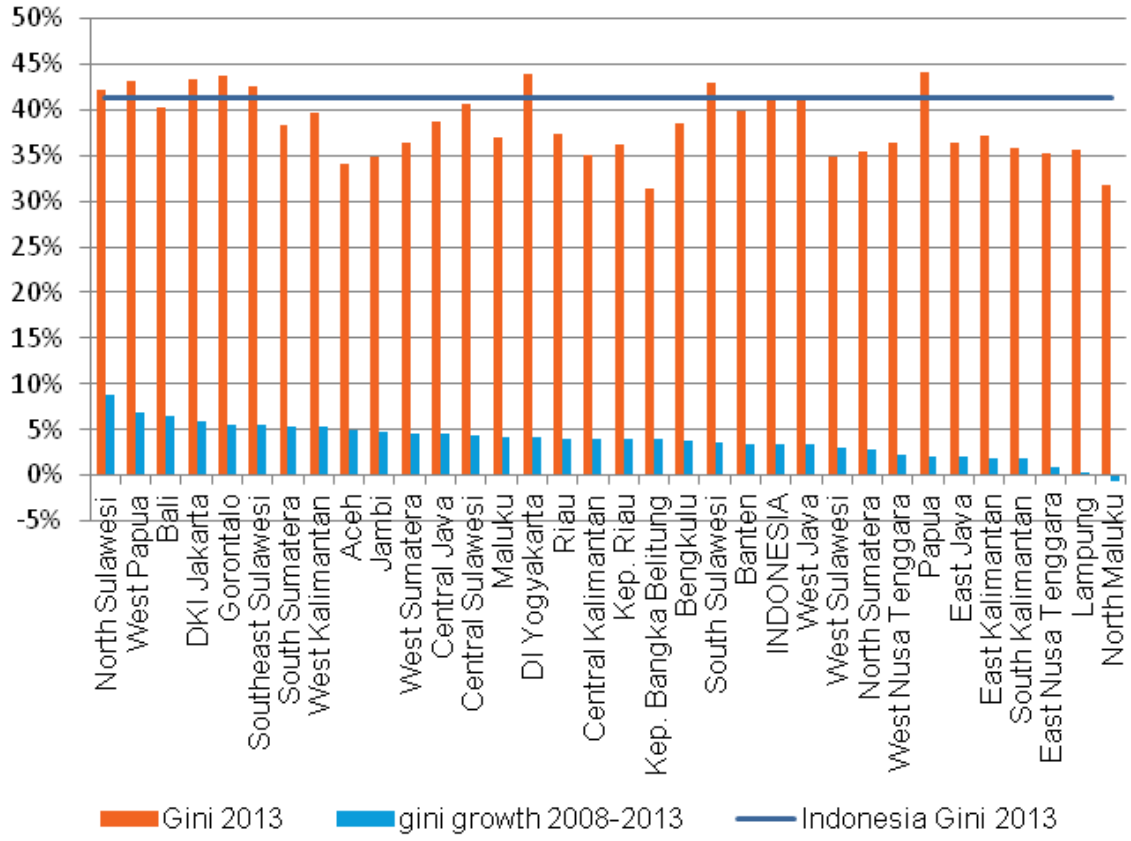

Sumber: BPS, diolah oleh penulis

Meskipun terjadi tren peningkatan ketimpangan penghasilan selama lebih dari dua dekade terakhir, berbagai tanda menunjukkan adanya perbaikan akhir-akhir ini. Koefisien Gini untuk Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,02 poin menjadi 0,39 antara Maret 2015 dan Maret 2016, setelah tetap berada pada level 0,41 selama lima tahun terakhir. [13] Penurunan yang sedikit ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk meningkatnya penghasilan di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan terjadinya sedikit penurunan pendapatan masyarakat berpenghasilan tinggi akibat harga komoditas yang rendah.[14] Selain itu, data terakhir menunjukkan bahwa rasio Gini mengalami sedikit penurunan dari 0,397 poin pada Maret 2016 menjadi 0,394 poin pada September 2016. Penurunan ini tampak baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, yang disebabkan antara lain oleh belanja pemerintah[15]. Meskipun indikator awal terjadinya pengurangan ketimpangan penghasilan ini patut dihargai, hal ini terjadi setelah pola yang terus mengalami peningkatan selama beberapa dekade. Masih terlalu dini untuk melihat hal ini mengarah ke tren yang bersifat jangka panjang, dan ketimpangan masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Jumlah milioner di Indonesia meningkat cepat dari satu orang pada tahun 2000 menjadi 20 orang pada tahun 2016

Gambaran ketimpangan kekayaan di Indonesia bahkan lebih suram. Hal ini sejalan dengan situasi secara global: sebuah laporan OXFAM yang dipublikasikan pada Januari 2017 menunjukkan 8 orang paling kaya memiliki separuh kekayaan penduduk bumi.[16] Selama 15 tahun terakhir menunjukkan konsentrasi kekayaan di Indonesia, dengan kelompok ultrakaya terus bertambah kekayaannya, di mana posisi istimewa tersebut diraih dari pemanfaatan sumber daya ekonomi dan komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan mineral lainnya, atau dari bidang multimedia, teknologi komunikasi, dan keuangan. Jumlah miliader di

Indonesia telah meningkat secara pesat dari satu orang pada tahun 2002 menjadi 20 pada tahun 2016 (Gambar 5). Indonesia saat ini memiliki 20 miliarder yang tercatat dalam daftar miliarder *Forbes*, dan kesemuanya adalah laki-laki. Gabungan kekayaan mereka diperkirakan sebesar $49,8 miliar. kekayaan yang melimpah terkumpul pada kelompok terkaya, sedangkan 92 persen dari penduduk Indonesia memiliki kekayaan kurang dari $ 10.000.[17]

Gambar 5: Jumlah Miliarder di Indonesia

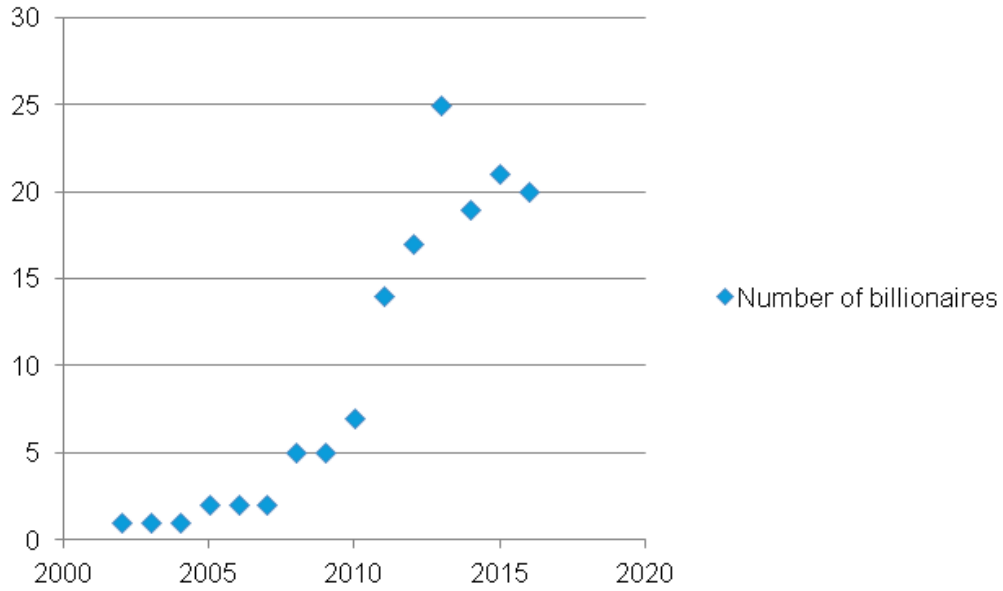

Sumber: *Forbes* (2016) *The World's Billionaires*.

Empat miliader terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 100 penduduk miskin di Indonesia

Data lain juga menunjukkan begitu tingginya tingkat ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan rasio Gini yang mengukur distribusi kekayaan di berbagai negara, Indonesia merupakan negara nomor enam di dunia yang kekayaannya paling tidak merata. (Tabel 1). Data Credit Suisse menunjukkan hanya 1 persen orang terkaya menguasai setengah atau 49 persen total kekayaan pada tahun 2016, sementara hanya 10 persen yang menguasai 77 persen dari total kekayaan.[18] Empat miliarder paling kaya di Indonesia memiliki kekayaan $ 25 miliar lebih banyak dari total kekayaan 100 juta penduduk miskin yang jika digabungkan yang mencapai $ 24 miliar. [19] Total kekayaan 40 persen penduduk paling miskin kalau digabungkan hanya mencapai 1,4 persen dari total kekayaan nasional.[20] Orang paling kaya di Indonesia membutuhkan waktu 22 tahun untuk menghabiskan kekayaannya bila ia berbelanja $ 1 juta per hari.[21] Hanya dalam satu hari, orang paling kaya mendapatkan bunga dari kekayaannya melebihi seribu kali jumlah yang dibelanjakan oleh penduduk miskin untuk kebutuhan dasar selama satu tahun.[22] Jumlah uang yang dihasilkan setiap tahunnya hanya dari kekayaannya cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.[23]

Jumlah uang yang orang paling kaya hasilkan cukup untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia

Tabel 1: Negara dengan Tingkat Ketimpangan Kekayaan Paling Tinggi

Negara	Gini Kekayaan %	Urutan
Russia	92.3	1
Denmark	89.3	2
India	87.6	3
Amerika Serikat	86.2	4
Thailand	85.9	5
Indonesia	84	6

Indonesia adalah Negara nomer 6 yang kekayaannya paling tidak merata

Sumber: Credit Suisse Global Wealth Databook (2016); Dikompilasi oleh penulis. Dari sampel 46 negara yang datanya diklasifikasikan '*fair*', 'memuaskan' atau 'bagus'.

Ketimpangan bukan semata-mata mengenai penghasilan dan kekayaan (ketimpangan hasil atau *outcomes*). Ketimpangan juga menyangkut peluang atau kesempatan, seperti tidak meratanya akses atas layanan kesehatan dan pendidikan. Kedua-duanya saling memperkuat dan terkait, di mana ketidaksetaraan kesempatan mengakibatkan *outcome* yang tidak setara, sedangkan *outcome* mempengaruhi peluang untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Laporan ini menggambarkan keterkaitan antara kedua bentuk ketimpangan tersebut.

88 persen penduduk Indonesia percaya bahwa penting bagi pemerintah untuk menurunkan ketimpangan

Persoalan ketimpangan tidak hanya menyangkut masalah pendapatan dan kekayaan. Ketimpangan pada akhirnya adalah mengenai kekuasaan. [24] Ketimpangan ekonomi menyebabkan ketimpangan kekuasaan dalam hal siapa yang membuat aturan, siapa yang menguasai modal dan sumber daya, dan siapa yang dapat menantang *status quo*. Kekuasaan yang tidak imbang juga tampak pada bentuk ketidaksetaraan lain seperti ketimpangan gender. Dari kalangan mana mereka dan di mana mereka tinggal akan mempengaruhi peluang mereka untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Indonesia berada di peringkat ke-88 dari 144 negara dalam Indeks Ketimpangan Gender yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, dan berada pada posisi yang lebih buruk lagi untuk kesetaraan gender dalam hal partisipasi dan peluang ekonomi (107 dari 144 negara).[25] Tingkat ketimpangan spasial yang tinggi juga terlihat di Indonesia, antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara bagian Timur dan Barat, dengan angka kemiskinan paling tinggi di pedesaan,[26] menunjukkan lebarnya ketimpangan antardaerah. Laporan ini berfokus pada ketimpangan ekonomi, yang meningkat dengan cepat dan memiliki dampak pada ketimpangan lain.

Terdapat keprihatinan publik yang nyata tentang tingginya ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok lainnya. Sebesar 92 persen warga Indonesia meyakini bahwa Indonesia cukup merata atau tidak merata sama sekali, dan 88 persen penduduk Indonesia berpendapat penting bagi pemerintah menurunkan ketimpangan.[27] Kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan diakui oleh Presiden Joko Widodo yang menggambarkan ketimpangan pada tingkat yang 'berbahaya' dan menyatakan dan "pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi pemerintahan saya, bagi rakyat, akan tetapi lebih penting lagi untuk mempersempit ketimpangan"'.[28] Sebagai pernyataan dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, bahwa "ini bukan kanan atau kiri yang berbahaya. Musuh utama kita adalah ketimpangan". [29]

"Ini bukan kanan atau kiri yang berbahaya. Musuh utama kita adalah ketimpangan"

Zulkifli Hasan, MPR

Apa arti ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok lainnya bagi Indonesia?

Bekerja tanpa lelah: seorang pemulung tua beristirahat di pinggir jalan ketika yang lainnya tergesa-gesa melalui lalu lintas di ibu kota Jakarta. Foto: Tiara Audina/Antropologi UI

JUTAAN ORANG MASIH HIDUP DALAM KEMISKINAN

Hal paling penting untuk digarisbawahi, ketimpangan menyebabkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengagumkan tidak dapat dinikmati oleh kaum miskin dan kelompok yang paling rentan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak tahun 2000 telah berhasil mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, dengan jumlah penduduk miskin dari 40 persen pada tahun 2000 turun menjadi 8 persen pada tahun 2014. [30] Walau demikian, data terbaru Bank Dunia menunjukkan lebih dari 20 juta penduduk masih hidup di dalam kemiskinan ekstrem dengan pendapatan di bawah $ 1,90 per hari.[31] Jika angka kemiskinan dinaikkan menjadi $ 3,10 per hari, tingkat penduduk miskin meningkat menjadi 93 juta atau 36 persen dari total penduduk.[32] Karena itu, banyak penduduk Indonesia yang hidup di atas garis kemiskinan, namun rentan untuk kembali miskin. Sebesar 55 persen keluarga dikategorikan miskin oleh Bank Pembangunan Asia pada tahun 2014, yang sebelumnya tidak masuk dalam kelompok miskin,[33] menunjukkan tingginya risiko untuk jatuh dalam kemiskinan.

Terdapat konsensus meningkatnya ketimpangan dapat menurunkan tingkat pengentasan kemiskinan. Jika manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati orang kaya lebih dari yang dinikmati orang miskin, penurunan kemiskinan akan melambat. [34] Data menunjukkan 10 persen orang-orang terkaya di Indonesia secara konsisten mengonsumsi lebih dari seperempat total konsumsi, sementara 10 persen termiskin secara konsisten hanya mengonsumsi 4 persen dari total konsumsi. Hal ini berlaku baik di perkotaan maupun di pedesaan.[35] Temuan Bank Dunia menunjukkan pembagian yang tidak merata dari pertumbuhan antara tahun 2003 hingga 2010 telah mendorong pelambatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. [36] Lebih dari itu, walaupun tingkat pertumbuhan tinggi, pengentasan kemiskinan melambat pada tahun 2014.[37]

Peningkatan jumlah jutawan dan miliarder di negeri ini, ketika dikontraskan dengan situasi kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan, membuktikan bahwa kelompok kayalah yang meraup manfaat dari kinerja ekonomi Indonesia yang banyak digembar-gemborkan, sementara jutaan kalangan bawah dibiarkan tertinggal di belakang. Ketimpangan bermakna bahwa hasil pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara adil dan menghambat kemampuan untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan. Pada tahun 2014, Oxfam memperkirakan bahwa jika Indonesia mengurangi koefisien Gini hanya sebesar 10 poin antara tahun 2011 dan 2019 maka hanya dapat mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sebesar 1,7 juta. Walau demikian, jika ketimpangan tetap berada pada tingkat saat ini, akan ada tambahan 13 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem pada tahun 2019.[38]

Sejak tahun 2010, 10 persen orang paling kaya secara konsisten menguasai seperempat total konsumsi, sementara 10 persen termiskin menguasai kurang dari sepersepuluh

Gambar 6: Proyeksi Kemiskinan 2011-2019, Analisis Oxfam

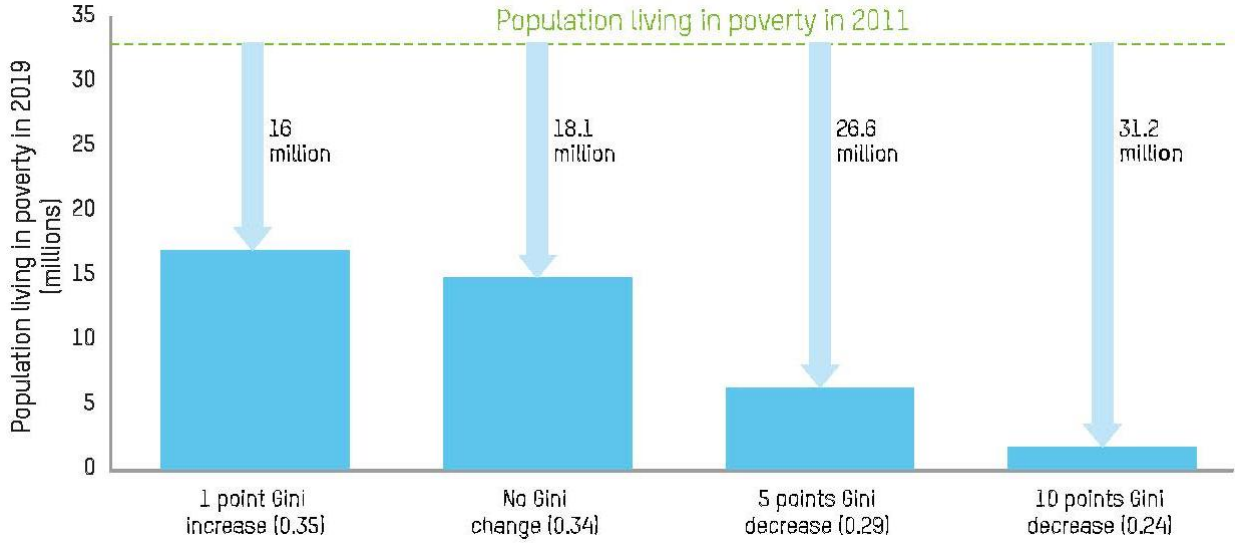

Sumber: Oxfam (2014). *Even It Up: Time to End Extreme Inequality*.[39] Proyeksi dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tetap.

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TERHAMBAT

Kini terdapat konsensus yang semakin menguat bahwa meningkatnya ketimpangan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2014 penelitian IMF menyimpulkan tingkat ketimpangan yang tinggi akan memperlambat pertumbuhan;[40] di mana hal ini konsisten dengan temuan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bahwa upaya mengurangi ketimpangan akan mendorong pertumbuhan dalam jangka menengah.[41] Bank Dunia bahkan telah memperingatkan bahwa risiko dari meningkatnya ketimpangan adalah melambatnya pertumbuhan di Indonesia dalam jangka panjang.[42] Penelitian SMERU menemukan ketimpangan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Studi tersebut menunjukkan meskipun tingkat ketimpangan yang lebih rendah pada awalnya mungkin tidak menghalangi pertumbuhan dan lapangan kerja, apabila tingkat ketimpangan melewati ambang batas tertentu maka akan berdampak negatif pada pertumbuhan.[43] Studi juga menunjukkan ketimpangan ekonomi terkait dengan ketimpangan lain seperti akses atas pendidikan dan layanan kesehatan. Dimensi ketimpangan ini secara signifikan mengurangi dampak pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik dan sosial.[44]

Ketimpangan tidak hanya menurunkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada keberlanjutannya. Tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai akibat dari adanya ketimpangan mengakibatkan banyak penduduk yang tidak mampu membeli barang dan jasa – suatu kegiatan ekonomi yang mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan. Selain itu, banyak keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membayar biaya layanan kesehatan yang sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja serta untuk mendorong pertumbuhan di Indonesia.

KOHESI SOSIAL YANG MELEMAH

Ketimpangan bertentangan dengan esensi dari budaya politik Indonesia. Ketika Presiden Jokowi menyatakan masalah ketimpangan akan menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2017, publik diingatkan pada asas kelima dari filosofi Indonesia yaitu 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya untuk segelintir'. [45] Dengan kata lain, sudah menjadi suatu norma di Indonesia bahwa setiap orang berhak atas akses terhadap kesempatan yang sama.

Akhir-akhir ini, perhatian lebih banyak diberikan kepada keterkaitan antara ketimpangan dan konflik. Sebuah studi yang mengkaji hubungan antara ketimpangan ekonomi dan kekerasan, kekerasan etnis dan kejahatan di Indonesia menemukan korelasi positif antara ketimpangan dan jumlah kejadian kekerasan rutin. yang kerap terjadi. Penelitian tersebut juga menemukan ketimpangan yang lebih tinggi antara yang kaya dan yang lainnya berhubungan dengan meningkatnya kejahatan dengan kekerasan.[46] Studi lain menemukan kabupaten dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dari angka rata-rata di Indonesia memiliki tingkat konflik yang tingginya 1,6 kali dari kabupaten dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah.[47] Beberapa studi juga mengamati berbagai ketimpangan yang lain di Indonesia terkait dengan konflik kekerasan. Misalnya, daerah dengan perbedaan angka kematian anak yang lebih besar antara kelompok cenderung merupakan daerah di mana terjadi konflik yang mematikan.[48]

Kabupaten dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dari angka rata-rata di Indonesia memiliki tingkat konflik yang tingginya 1,6 kali dari kabupaten dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah.

Meningkatnya jumlah kalangan ultra-kaya di tengah-tengah kemiskinan yang semakin meluas dapat mengancam kohesi sosial dan politik. Ketidakseimbangan kekuasaan yang berakibat pada ketimpangan yang lebar antara kelompok kaya dan kelompok lain semakin melanggengkan ketimpangan karena mereka yang berada di atas memiliki akses istimewa dan pengaruh pada proses pengambilan keputusan yang dimanfaatkan agar perekonomian dan berbagai kebijakan dapat melayani kepentingan mereka, sedangkan kepentingan orang-orang yang berada di bawah cenderung tidak dihiraukan. Hal ini pada gilirannya berakibat pada ketidakstabilan sosial karena ruang politik dan ekonomi digunakan untuk memenuhi kepentingan segelintir orang daripada kepentingan banyak orang.

3. APA PENYEBAB MENINGKATNYA KETIMPANGAN DI INDONESIA

FUNDAMENTALISME PASAR

Selama tiga ratus tahun terakhir, ekonomi pasar telah memakmurkan ratusan juta orang di seluruh wilayah Asia Tenggara.[49] Walau demikian, sebagaimana diungkapkan oleh ekonom Thomas Piketty dalam bukunya yang berjudul *Capital in the Twenty-First Century*, tanpa ada campur tangan pemerintah, ekonomi pasar cenderung menyebabkan kekayaan terkonsentrasi pada sedikit orang sehingga ketimpangan akan meningkat.[50] Saat ini banyak yang berpendapat bahwa ekonomi 'menetes ke bawah' atau *trickle-down economics'*, di mana kekayaan seharusnya mengalir ke bawah tanpa adanya campur tangan pemerintah hanyalah mitos belaka. [51]

Hingga terjadinya krisis keuangan di Asia yang dimulai tahun 1997, Indonesia memiliki sejarah pertumbuhan yang cukup merata. Investasi di bidang kesehatan dan pendidikan dasar merupakan faktor penting dalam menjaga tingkat pertumbuhan dan penurunan kemiskinan..[52] Ini dibiayai melalui penerimaan pajak di mana Indonesia merupakan nomor 2 negara di kawasan yang tingkat rasio pajak terhadap GDP paling tinggi antara tahun 1990 hingga 1995,[53] berbeda dengan kondisi saat ini (lihat Gambar 9). Indonesia juga merupakan negara tertinggi yang anggaran untuk masyarakat miskin tertinggi selama masa 'kebangkitan Asia' tersebut,[54] dan setiap tiga poin pertumbuhan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan sebanyak 3 persen. [55] Selama periode tersebut, ekonomi di negara-negara Amerika Latin harus tumbuh lima kali lipat untuk mencapai tingkat penurunan kemiskinan seperti yang dicapai Asia Timur.[56] Meskipun demikian 'Keajaiban Asia Timur' ini memiliki sisi gelap, dengan adanya pembatasan hak-hak manusia dan politik mendasar serta buruknya pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi terjadi seiring dengan tingginya tingkat pemerataan distribusi pendapatan.[57]

Pada puncak pertumbuhan yang merata di Indonesia, setiap titik persentase pertumbuhan mengurangi 3 persen jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Walau demikian, setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1997, Indonesia harus melakukan penyesuaian struktural agar dapat memperoleh pinjaman dari Bank Dunia dan IMF**.** Apa yang terjadi pada periode berikutnya, kelompok kaya mendapatkan manfaat pertumbuhan yang lebih besar. Sementara kelompok bawah menyaksikan pendapatan orang kaya meningkat dan peningkatan pelayanan yang jauh lebih lambat. Berbagai paket penyesuaian mencakup upaya privatisasi yang berskala besar untuk layanan publik, penghapusan subsidi untuk sebagian komoditas mendasar, penghapusan perlindungan yang efektif untuk pembudidayaan beras dan gula, serta fleksibilitas yang dipaksakan atas pasar tenaga kerja.[58] Setelah tingkat ketimpangan mengalami penurunan sesaat – begitu golongan di bagian paling atas yang memiliki banyak aset terkena dampak krisis keuangan – dari awal abad ke-21, ketimpangan mulai melebar sebagai akibat dampak dari penyesuaian struktural terhadap perekonomian. Dampak dari pajak rendah, belanja rendah, dan liberalisasi pasar tenaga kerja terhadap ketimpangan akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Banyak kalangan terkaya di Indonesia yang memperoleh kekayaan mereka berkat konsesi eksklusif dari pemerintah dan proses privatisasi yang terjadi seiring dengan fundamentalisme pasar. Ketika aset publik diprivatisasi, pemilik aset dapat menjual kembali

produk atau jasa dengan harga yang lebih mahal ke negara yang awalnyamenjual bisnis tersebut. Misalnya, setelah privatisasi, harga air di Jakarta meningkat dari sekitar AS$0,13 menjadi AS$ 0,54 per meter kubik – 2,7 kali tarif yang dikenakan oleh PDAM di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia.[59]

Liberalisasi keuangan mengakibatkan lebih banyak dana yang tersedia bagi sektor usaha untuk meningkatkan produksi di sektor komoditas, dan mereka yang mempunyai investasi pada perusahaan akan meraup untung. Sektor kelapa sawit adalah salah satu contohnya. Sekitar US$ 12,5 miliar ditanamkan untuk perluasan kelapa sawit selama periode tahun 2000-2008.[60] Sepuluh perusahaan kelapa sawit terbesar didanai rata-rata 59 persen melalui ekuitas, dan 41 persen melalui utang,[61] dan mereka yang mempunyai investasi akan mendulang keuntungan. Sebagian besar dari sepuluh laki-laki terkaya di Indonesia memiliki usaha kelapa sawit di dalam portofolio mereka.[62]

Nilai kurs yang kuat yang disebabkan oleh tingginya harga komoditas merugikan industri manufaktur yang menyebabkan proses deindustrialisasi terjadi secara dini. Manfaat dari pertumbuhan industri manufaktur yang berbasis luas dan telah dinikmati golongan mayoritas pada periode sebelum terjadi krisis keuangan di Asia telah tergantikan dengan pertumbuhan berbasis ekspor komoditas di mana sebagian besar keuntungan yang diperoleh dinikmati olehsegelintir golongan sehingga ketimpangan semakin lebar.

POLITICAL CAPTURE

Faktor pendorong utama dari ketimpangan pada tingkat global adalah *political capture*, di mana kalangan elite mengubah aturan main agar menguntungkan mereka, dengan mengorbankan kalangan banyak. Ketimpangan ekonomi meningkatkan ketimpangan politik karena golongan elite dapat memanfaatkan pengaruh politik mereka untuk lebih mempertahankan keuntungan yang mereka dapatkan, pada saat yang sama menghalangi kebijakan yang memperkuat hak-hak masyarakat kebanyakan.[63] Contohnya, penguasaan atas sebagian besar sektor strategis bagi pertumbuhan oleh segelintir individu yang berpengaruh memberikan mereka kendali atas sebagian besar perekonomian sehingga memungkinkan mereka untuk memboikot kebijakan dan merintangi perekonomian ketika kebijakan tersebut dianggap tidak menguntungkan. Konsentrasi kekayaan pada golongan di bagian atas di negara berkembang juga membuka peluang untuk praktik *rent-seeking* (pengambilan kekayaan tanpa menciptakan kekayaan baru).[64]

Kekayaan memang dapat membeli pengaruh politik, dan negara ini memiliki sejarah panjang kaum elite yang memanfaatkan kekayaan mereka untuk mendukung kampanye politik ataupun ikut serta dalam arena persaingan politik itu sendiri.[65] Pengaruh seperti ini memungkinkan kalangan elite untuk terus memperkaya diri mereka sendiri[66], yang akibatnya meningkatnya ketimpangan. Di jaman Soeharto – mantan presiden Indonesia – oligarki-oligarki modern Indonesia yang pertama muncul, sehingga masa kekuasaannya dipenuhi dengan contoh dimana teman-teman dekat dan kerabat mendapatkan akses istimewa terhadap pinjaman, konsesi, lisensi impor, dan dana talangan.[67] *Booming* komoditas dalam beberapa tahun terakhir membuka peluang untuk pemburu rente.[68] Sebuah studi empiris dari 100 negara oleh Branko Milanovic menunjukkan bagaimana golongan elite kaya berkepentingan untuk meningkatkan ketimpangan karena kondisi tersebut cenderung akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari perekonomian yang semakin tidak merata dibanding pertumbuhan yang didistribusikan secara lebih adil.[69]

Struktur sistem pembiayaan politik dapat berkontribusi dalam memperkuat atau mengurangi *political capture*. Aturan yang terkait dengan pembiayaan politik Indonesia dalam hal ini

masih campur aduk. Secara resmi, terdapat transparansi atas keuangan kampanye karena dana kampanye harus dilaporkan oleh kandidat dan partai politik pada saat kampanye pemilu. Identitas donor dari calon dan partai politik juga harus diungkapkan dan hendaknya ada larangan sumbangan anonim untuk partai politik. Walau demikian, tidak ada larangan atas sumbangan dari badan usaha untuk calon atau partai politik, dan secara khusus tidak ada larangan atas sumbangan dari perusahaan yang memegang kontrak pemerintah. Selanjutnya, tidak ada batasan seberapa besar dana suatu partai politik dapat dihabiskan, atau seberapa banyak pihak donor dapat memberikan sumbangan kepada calon, sehingga membuka peluang bagi kaum elite untuk mempengaruhi proses politik.[70]

Dengan menelaah bagaimana miliarder di Indonesia memperoleh kekayaannya, maka akan diperoleh gambaran tentang skala dari *political capture* di negara ini. Grafik 7 di bawah menunjukkan industri apa saja di Indonesia yang paling banyak menyumbang pada kekayaan para miliarder Indonesia. Seperti yang terlihat, industri keuangan menghasilkan kontribusi terbesar bagi kekayaan para miliarder Indonesia . Pertanian dan pertambangan juga menyumbangkan proporsi yang cukup besar pada kekayaan para miliarder di Indonesia, yang memang wajar karena sektor-sektor tersebut memiliki porsi besar dalam perekonomian Indonesia. Grafik 7 menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan miliarder diperoleh dari industri yang diidentifikasi sebagai rawan terhadap kronisme oleh indeks kronisme terbitan majalah *The Economist*[71] karena profitabilitas dari industri tersebut sangat bergantung pada intervensi pemerintah (misalnya dalam bentuk peraturan, pengadaan dan subsidi). Porsi yang signifikan dari kekayaan miliarder yang berasal dari industri lain umumnya diwariskan. Sangat sedikit kekayaan miliarder Indonesia yang diperoleh secara mandiri dalam industri yang kompetitif. Meskipun indeks tersebut hanya menyebutkan industri yang *rentan* terhadap kronisme, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kekayaan miliarder dihasilkan dari praktik kronisme, temuan yang ada menunjukkan bahwa *political capture* mungkin saja ikut membantu munculnya banyak miliarder di Indonesia saat ini, sehingga mendorong ketimpangan.

Sebagian besar kekayaan miliarder diperoleh dari industri yang diidentifikasi sebagai rawan terhadap kronisme

Gambar 7: Asal Kekayaan Miliader di Indonesia, Berdasarkan Sektor Ekonomi (2014)

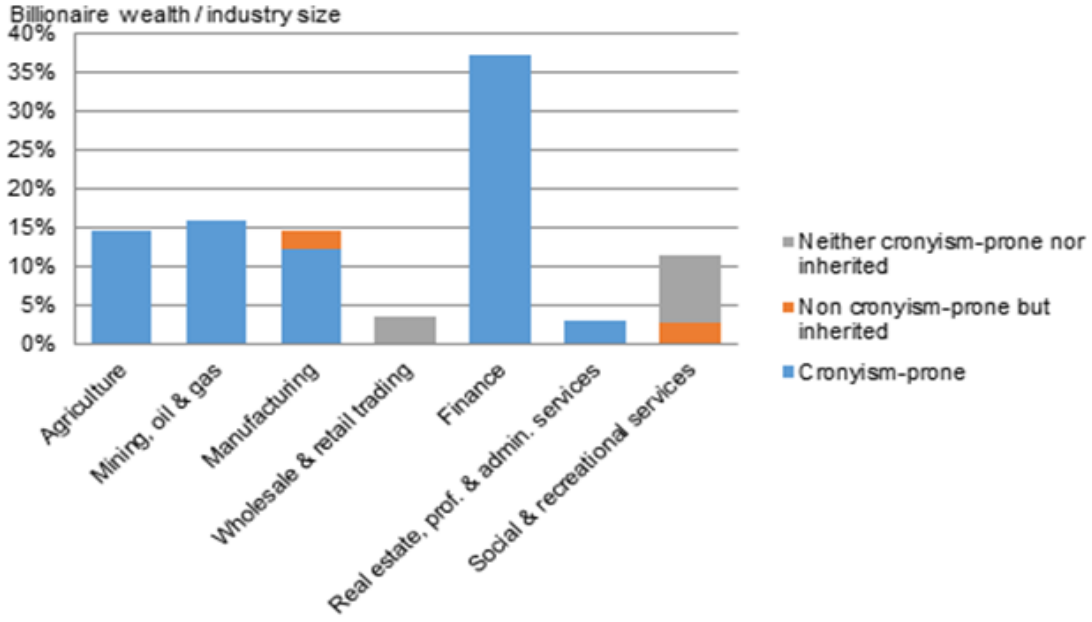

Sumber: *Forbes* (2016), Analisis penulis[72]

KETIDAKSETARAAN GENDER

Ketidaksetaraan gender adalah bentuk tertua dan paling mengakar dari masalah ketimpangan, yang terus mempengaruhi masyarakat, budaya dan perekonomian untuk meniadakan hak-hak kaum perempuan. Ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan gender berkaitan erat dan saling memperkuat. IMF menemukan bahwa ketidaksetaraan gender dan ketimpangan pendapatan berkorelasi erat, khususnya kaum perempuan kurang memiliki akses terhadap hak-hak mereka terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.[73]

Indonesia berada di posisi 88 pada Indeks Kesenjangan Gender WEF (WEF's Gender Gap Index), di bawah Filipina, Laos dan Thailand

Dari 50 orang terkaya di Indonesia, hanya satu orang perempuan, dan hanya 5-10 persen dari posisi manajemen tingkat tinggi yang diduduki oleh kaum perempuan.[74]

Indonesia berada di peringkat 88 pada indeks ketimpangan gender dari *World Economic Forum*, [75] jauh di belakang negara-negara tetangga ASEAN, seperti Filipina (7), Laos (43), dan Thailand (71), dan memperoleh skor 'menengah' pada indeks OECD tentang lembaga sosial.[76] Ketimpangan kekuasaan antara kaum perempuan dan laki-laki – dari tingkat rumah tangga hingga ekonomi makro – mengandung arti bahwa kaum perempuan berpeluang lebih kecil untuk memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan dan pengaruh atas kehidupan mereka sendiri, dan secara lebih luas lagi atas bagaimana sumber daya dialokasikan di masyarakat. Di Indonesia, kaum perempuan hanya menempati 1 dari 5 kursi parlemen. Dari 50 orang terkaya di Indonesia, hanya satu orang yang berasal dari kalangan perempuan, dan hanya 5-10 persen dari posisi manajemen tingkat tinggi yang diduduki oleh kaum perempuan.[77] Di sisi lain, pekerjaan yang dilakukan perempuan secara sistematis kurang dihargai atau dianggap remeh, sehingga kaum perempuan lebih banyak menjalani pekerjaan dengan bayaran terendah dan lebih rentan terhadap kemiskinan.[78] Ketimpangan upah antar-gender di Indonesia adalah 14,5 persen, yang berarti bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh kaum perempuan 14,5 persen lebih sedikit dari kaum laki-laki.[79]

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk menangani masalah ketidaksetaraan gender melalui berbagai inisitiaf, termasuk pengesahan UU Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan UU Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah juga memulai proses penganggaran responsif gender yang merupakan langkah awal yang baik untuk mendorong pertanggungjawaban belanja pemerintah untuk memenuhi sasaran kesetaraan gender.[80] Proses ini memastikan adanya akuntabilitas yang lebih besar atas setiap keputusan anggaran dan memungkinkan suara kaum perempuan untuk didengar, sehingga kebijakan yang menangani masalah ketidaksetaraan gender semakin diprioritaskan.

Walau demikian, masih diperlukan upaya perbaikan untuk memastikan adanya penegakan hukum dan untuk mencabut UU yang diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya, meskipun terdapat UU tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, kekerasan terhadap perempuan masih lazim terjadi.[81] Selain itu, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pada tahun 2015 saja, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengesahkan 31 peraturan yang diskriminatif gender [82] Saat ini, Indonesia memiliki 322 peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, mulai dari kewajiban berjilbab, hingga toleransi terhadap praktik poligami .[83] Berkaitan dengan hak-hak hukum perempuan dalam perekonomian, tidak ada peraturan tentang upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan tidak ada peraturan yang melarang diskriminasi berbaasi gender ketika melakukan rekrutmen.[84] Aktivis perempuan dan pegiat kesetaraan gender Oxfam telah mengidentifikasi UU Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pemicu utama terjadinya ketidaksetaraan gender di Indonesia. UU tersebut menetapkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai 'ibu' dari rumah tangga, melegalkan poligami, dan menetapkan batas usia minimal untuk menikah bagi anak perempuan hanya pada umur 16 tahun. Hal ini membatasi akses perempuan terhadap hak-hak mereka, memberikan

pembenaran terhadap pemberian upah yang lebih rendah bagi pekerja perempuan–karena mereka tidak dianggap sebagai kepala keluarga–dan menghalangi kaum perempuan mengakses dana dan kredit dari lembaga keuangan formal tanpa persetujuan dari suami atau ayah mereka.

Kelompok ekonomi perempuan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Melalui proyek RCL partisipasi perempuan telah meningkat dalam pengambilan keputusan dan ekonomi desa. Foto: Dini Widiastuti/Oxfam

Boks 1: Meningkatkan Kesetaraan Gender melalui Keterlibatan Kaum Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa

Mendorong partisipasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender merupakan bagian penting dari berbagai program intervensi Oxfam. Salah satu contoh adalah program *Restoring Coastal Livelihoods* (RCL) atau Pemulihan Sumber Penghidupan Masyarakat Pesisir, yang dilaksanakan di empat kabupaten di Sulawesi Selatan untuk periode tahun 2000-2015. Melalui RCL, Oxfam mendukung pembentukan dan pengembangan 74 kelompok ekonomi perempuan dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Melalui pelatihan dan keterlibatan dengan anggota masyarakat, Oxfam juga mendorong diskusi tentang isu-isu gender yang sensitif. Sebagai hasilnya, 1.208 perempuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan kawasan pesisir, serta mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kekuasaan dalam rumah tangga dan masyarakat. Perwakilan masyarakat di 34 desa telah memperoleh pelatihan tentang masalah yang terkait dengan gender, sehingga tersusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang peka gender.

Sebelumnya, perempuan di daerah sasaran kurang berperan dalam musrenbang tingkat desa. Muh Yunus, Ketua Badan Pembangunan Desa untuk Desa Nisombalia, mengatakan: “Pada masa lalu, penduduk desa enggan menghadiri forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Mereka merasa bahwa aspirasi mereka tidak akan didengar jika tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati [kepala pemerintah daerah]. Karena itu, masyarakat kehilangan minat untuk ikut bergabung lagi. Tetapi setelah dijelaskan tentang prosesnya, dan pentingnya partisipasi anggota masyarakat dalam musrenbang, sekarang telah banyak yang ikut berpartisipasi, dan bahkan sering terjadi perdebatan dalam pertemuan desa, lokakarya, dan musrenbang.”

Tingkat partisipasi kaum perempuan saat ini telah tinggi. “Sebelum bantuan dari Oxfam yang terkait dengan RPJMD, keterlibatan perempuan nihil, tetapi sekarang, alhamdulillah, partisipasi perempuan telah meningkat, rasio perempuan dibanding laki-laki adalah 50:50,” kata Husnah, peserta aktif dalam pertemuan masyarakat dan merupakan anggota dari kelompok ekonomi Pa’jala Tupa’biring.

Begitu perempuan ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, aspirasi kaum perempuan tercermin dalam rencana pembangunan desa. “Sebelumnya, usulan di RPJMD sering terfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi sekarang kita dapat mengusulkan banyak hal, seperti melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kaum perempuan, misalnya dalam pengolahan hasil laut, kursus untuk mereka yang buta huruf, usulan tentang kesehatan perempuan dan anak-anak, serta masih banyak lagi,” lanjut Husnah.

Sumber: Diambil dri *Sipadecengi – Saling Membangun, Saling Memperbaiki (Pelajaran-Pelajaran Terbaik Program Perbaikan Penghidupan Pesisir),* Agustus 2015, hal65.

AKSES YANG TIDAK SETARA TERHADAP LAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

Akses universal terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas secara gratis akan menjamin kesempatan yang setara dan sangat penting bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati pada tahun 2015.[85] Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan: “Semua warga negara seharusnya memiliki kesempatan

sama tanpa kecuali."[86] Dokumen Oxfam yang berjudul *'Working for the Many'* menguraikan bagaimana layanan masyarakat dapat menambah 'pendapatan virtual' dari kaum miskin, terutama anak perempuan dan kaum perempuan, sehingga ikut berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan gender.[87] Selain itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan gratis akan memberikan landasan untuk mengembangkan warga yang berpendidikan dan dapat menuntut adanya akuntabilitas dan perubahan.

Walau demikian, di Indonesia total belanja sosial sebagai persentase dari PDB lebih rendah dari banyak negara-negara lain di kawasan ini, termasuk Malaysia, Vietnam, dan Thailand, dan sebesar kurang dari seperlima belanja sosial di Brasil, yang memiliki perekonomian sebanding (Gambar 9). Kurangnya dana berarti layanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia tidak dapat sepenuhnya memainkan peran mereka dalam menanggulangi ketimpangan.

Gambar 8: Belanja Sosial sebagai Persentase PDB di Asia Tenggara dan Brasil

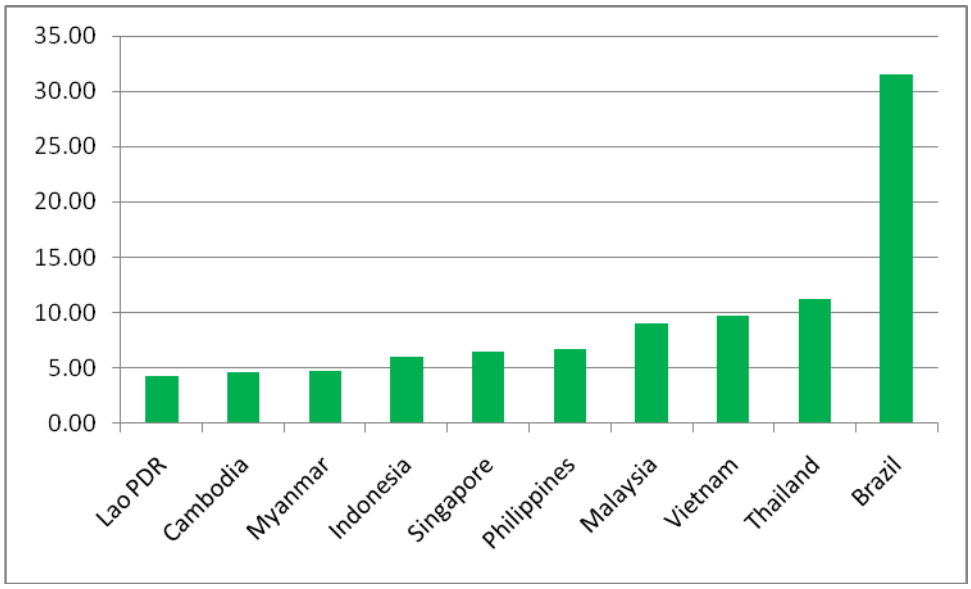

Sumber: Oxfam, *Commitment to Reducing Inequality Index* (akan terbit, 2017); menggunakan data terbaru yang sudah dikonfirmasi; kombinasibelanja kesehatan, pendidikan dan jaminan social sebagai persentase atas PDB

Hanya 55 persen dari anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mengenyam sekolah menengah.

Kesetaraan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas masih menjadi keprihatinan besar. Peningkatan investasi oleh Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan telah menyebabkan hampir semua anak mengenyam pendidikan dasar. [88] Namun, hanya 55 persen dari anak-anak yang berasal dari keluarga miskin terdaftar di sekolah menengah. Berbagai keterampilan yang seharusnya diperoleh dari lembaga pendidikan formal dan pendidikan informal masih jauh dari optimal, yang membuat sulit bagi kaum muda untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah survei pada tahun 2016 memperlihatkan Indonesia menempati peringkat terendah dari 34 negara anggota OECD dan dalam hal keaksaraan dan keterampilan orang dewasa. [89] Dalam sebuah survei INFID yang dilakukan pada tahun 2014, masyarakat menyebutkan ketidakmerataan dalam pencapaian pendidikan merupakan penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.[90] Meskipun secara nominal belanja pendidikan naik setiap tahun, anggaran pendidikan sebagai persentase dari PDB hanya sebesar 3,4 persen.[91] Rasio ini jauh di bawah standar UNESCO untuk anggaran belanja pendidikan yang disarankan minimal 6 persen dari PDB.[92] Anggaran pendidikan yang rendah ini juga menyebabkan menjamurnya sekolah swasta – yang mewakili 40 persen dari angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan menengah di Indonesia.[93] Sekolah swasta tidak dapat diakses oleh mereka yang paling miskin, dan cenderung memarginalkan anak perempuan. Selain itu, ketimpangan antar-daerah juga tampak dalam mengakses pendidikan berkualitas. Misalnya, sekolah-sekolah di daerah

pedesaan dan bagian timur Indonesia cenderung tidak memiliki fasilitas yang layak atau pengajar terlatih.[94]

Indonesia adalah negara berkinerja terburuk di antara negara-negara OECD dalam hal literasi dan keterampilan orang dewasa

Pemerintah saat ini bergantung pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai instrumen kunci untuk memperluas akses terhadap pendidikan bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Di bawah program ini, kaum muda berusia 6-21 tahun yang memiliki KIP, atau dari rumah tangga yang memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), berhak atas dana bantuan pendidikan saat terdaftar di pendidikan formal atau kejuruan.[95] Program ini bertujuan meningkatkan tingkat partisipasi di sekolah dasar dan menengah, mengurangi angka putus sekolah, dan mengurangi ketimpangan pendidikan di antara kelompok yang berbeda (kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, serta daerah pedesaan dan perkotaan). Program ini berupaya memperbaiki program BLT sebelumnya untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan memperluas jangkauan dari 11,2 juta menjadi 20,3 juta anak, dan mencakup pendidikan kejuruan.[96] Walau demikian, program ini belum mampu mengatasi masalah pendidikan secara efektif di tingkat lokal, terutama di daerah-daerah yang secara geografis sulit terjangkau.

Kondisi untuk layanan kesehatan lebih positif. Indonesia telah mengalami banyak kemajuan menuju pencapaian jaminan kesehatan universal (UHC, *Universal Health Coverage*) dengan memperkenalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjangkau seluruh penduduk. JKN telah berhasil diluncurkan dan sudah menjadi sistem pembayar kesehatan tunggal terbesar di dunia.[97] Hal lain yang mengesankan adalah bahwa program ini bertujuan mencakup semua kelompok masyarakat (kaya dan miskin, sektor formal dan informal) ke dalam satu kumpulan risiko, dan bilamana berhasil, akan meningkatkan cakupan, efisiensi dan efektivitas pendanaan. Meskipun telah mengambil langkah-langkah menuju arah yang diinginkan, sistem ini masih bergantung pada premi yang perlu dibayarkan, sehingga menghambat jutaan orang untuk dapat mengakses layanan kesehatan. Belanja kesehatan yang masih hanya sebesar 1 persen dari PDB sangat rendah dibanding standar regional. Di Vietnam, belanja kesehatan adalah 1,6 persen dari PDB dan 2,1 persen di Thailand. Di Brasil, belanja untuk kesehatan sebesar 9,7 persen dari PDB. [98] Hal ini mungkin disebabkan rendahnya penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat. Rumah sakit swasta menjamur ketika kurangnya investasi di bidang kesehatan masyarakat dan privatisasi fasilitas kesehatan di Indonesia mengandung arti bahwa banyak rakyat Indonesia yang sama sekali tidak mampu menjangkau layanan kesehatan. Contohnya, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, privatisasi Rumah Sakit Umum Yohannes telah mendorong lonjakan biaya hingga 600 persen.[99]

AKSES YANG TIDAK SETARA TERHADAP INFRASTRUKTUR DAN LAHAN

Akses terhadap infrastruktur, seperti jalan, jembatan, telekomunikasi dan listrik, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dan merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi ketimpangan antara daerah pedesaan dan perkotaan, sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi secara keseluruhan.

57 persen dari jalan pedesaan tersebut dalam kondisi buruk.

Infrastruktur jalan di wilayah pedesaan meliputi sekitar 80 persen dari total jaringan jalan di Indonesia, namun 57 persen dari jalan tersebut berada dalam kondisi buruk.[100] Berdasarkan pengamatan Oxfam selama pengalamannya mendampingi para petani pedesaan di bagian timur Indonesia, dari Papua ke Nusa Tenggara Timur, kondisi jalan yang buruk di daerah pedesaan menyebabkan terisolasinya para petani secara geografis, sehingga mereka tidak dapat mengakses pasar yang lebih luas dan/atau tidak memperoleh harga rendah untuk komoditas mereka karena perantara harus mengurangkan biaya transportasi yang signifikan dari harga beli tersebut. Kesulitan mengakses tempat-tempat ini juga berarti harga yang lebih tinggi untuk kebutuhan pokok (beras, minyak goreng), yang umumnya dipasok dari daerah lain di Indonesia.[101] Selain itu, jalan yang berkualitas buruk juga mempersulit mereka yang tinggal di daerah pedesaan untuk mengakses pendidikan, kesempatan kerja, dan layanan kesehatan. Kualitas jalan di daerah pedesaan yang miskin disebut sebagai salah satu faktor di balik angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia, karena menghalangi akses yang cepat dan mudah terhadap fasilitas kesehatan.[102]

Hanya 25 kelompok perusahaan besar menguasai 51 persen dari 5,1 juta hektare perkebunan kelapa sawit di seluruh negeri.

Akses terhadap pasokan listrik yang dapat diandalkan sangat penting untuk dapat melakukan berbagai kegiatan ekonomi pada tingkat rantai nilai (*value chain*) yang lebih tinggi, sedangkan cakupan listrik untuk sebagian besar provinsi di Indonesia mencapai lebih dari 86 persen pada tahun 2014, sementara beberapa daerah pedesaan seperti Nusa Tenggara Timur (74 persen) dan Papua (47 persen) memiliki cakupan yang jauh lebih rendah.[103] Sektor swasta umumnya enggan berinvestasi di daerah dengan pasokan daya listrik rendah dan jalan yang buruk, sehingga kegiatan industri dan ekonomi terkonsentrasi di Jawa dan daerah perkotaan yang lain, dan hal ini sangat merugikan bagi daerah pedesaan. Misalnya, Freeport Indonesia memutuskan untuk membangun pabrik peleburan atau pengolahan mineral di Gresik, Jawa Timur, bukan di Papua, karena ketidakpastian pasokan listrik di Papua.[104]

Kurangnya akses terhadap lahan adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap ketimpangan. Pada umumnya, petani kecil di Indonesia menggarap rata-rata kurang dari 0,25 hektar lahan, sehingga tidak dapat memberikan hasil yang cukup bagi seorang petani kecil untuk menghidupi keluarganya.[105] Selain itu, penelitian yang dilakukan Transformasi untuk Keadilan (TUK) dan Profundo pada tahun 2015,[106] menunjukkan bahwa 25 kelompok usaha besar menguasai 51 persen dari 5.1 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu wilayah yang hampir seluas separuh Pulau Jawa. Lima perusahaan tersebut masing-masing memiliki kepemilikan lahan melebihi 300.000 hektar. Konsentrasi kepemilikan tanah di tangan perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang kaya berarti hasil manfaat dari kepemilikan lahan menumpuk pada mereka yang berada di kalangan atas, dan tidak terbagi secara merata. Akses terhadap lahan yang tidak merata akan mendorong terjadinya ketimpangan yang lebih luas.[107]

Boks 2: Mendukung Inisiatif Kebijakan Satu Peta *(One Map Policy)*

Sekadau, sebagai kabupaten hasil pemekaran yang baru di Provinsi Kalimantan Barat, mayoritas dihuni oleh suku Dayak yang merupakan penduduk asli. Suku Dayak mengatur dan mengelola lahan dan hutan mereka sebagai harta milik umum, di bawah sistem hak milik adat. Karena penggunaan tanah ulayat dan hutan adat mereka tidak dilindungi oleh hak kepemilikan resmi, lahan mereka berada di bawah ancaman. Di mata pemerintah, tanah mereka dianggap "menganggur", dan dalam proses perencanaan tata ruang, pemerintah memperuntukkan lahan dan hutan tersebut untuk kegiatan komersial seperti pembalakan, perkebunan, atau pertambangan.

Suatu program yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang telah digagas oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) di Kabupaten Sekadau, dengan dukungan dari Oxfam. Pemetaan partisipatif atas tanah ulayat dan hutan adat digunakan sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat hukum adat agar dapat menuntut akses dan penguasaan mereka atas sumber daya alam. Instrumen ini juga telah digunakan untuk mempengaruhi perencanaan tata ruang lokal.

Inisiatif pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh JKPP telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan mereka dan penggunaan sumber daya alam. Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka yang terkait dengan sumber daya alam ataupun tentang pembangunan daerah dan proses perencanaan tata ruang. Pemerintah Kabupaten Sekadau menerima hasil pemetaan tersebut dengan baik, yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan konflik batas desa dan untuk memperbaiki batas-batas resmi dari desa. Dinas Kehutanan Kabupaten Sekadau mulai berkolaborasi dengan masyarakat lokal di Nanga Mahap untuk mengelola Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan sebagai upaya untuk mendelegasikan pengelolaan hutan tersebut kepada masyarakat.

Sumber: International Land Coalition[108]

PASAR TENAGA KERJA DAN UPAH YANG TIDAK ADIL

Penyebab utama ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah kondisi pasar tenaga kerja dimana sebagian besar tenaga kerja (sepertiga dari pekerja reguler) bekerja untuk pekerjaan berketerampilan rendah dengan upah rendah dan keamanan kerja yang tidak memadai.[109] Rasio ini lebih tinggi bagi pekerja perempuan, dan pola selama dua dekade terakhir menunjukkan adanya peningkatan dalam proporsi karyawan perempuan yang menerima upah rendah. Hal ini mencerminkan semakin banyaknya jumlah perempuan yang beralih dari pekerjaan rumah tangga tak berbayar ke pekerjaan kontrak paruh waktu.[110]

Pada saat yang bersamaan, Indonesia berusaha keras untuk memenuhi permintaan terhadap pekerja berketerampilan tinggi dan profesional, mengingat kurangnya keterampilan kerja yang relevan dari tenaga kerja yang dihasilkan dari semua tingkat pendidikan, mulai dari lulusan pendidikan tinggi hingga 60 persen tenaga kerja yang hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTP.[111] Kekurangan tenaga kerja berketerampilan tinggi telah mendorong upah mereka yang mampu melakukan pekerjaan berketerampilan tinggi, yang akibatnya makin meningkatnya ketimpangan upah antara pekerja terampil dan yang tidak terampil.[112] Hal ini juga memperparah ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan (serta bagian barat dan timur Indonesia), karena pekerja terampil sebagian besar bekerja untuk industri di daerah perkotaan dan pinggiran kota di bagian barat Indonesia.

Kurangnya pelatihan yang relevan juga berarti bahwa struktur tenaga kerja dan ekonomi di Indonesia tidak sesuai. Meskipun struktur ekonomi Indonesia bergeser semakin menjauh dari sektor agraria informal ke sektor industri dan sektor jasa formal (teknik sipil, sektor bangunan dan konstruksi karena program infrastruktur pemerintah yang ambisius), struktur tenaga kerja Indonesia masih condong lebih berat ke sektor agraria.

Boks 3: Impian atas Upah Hidup Layak dan Realitas Utang

EP, laki-laki berusia 31 tahun, telah bekerja selama 7 tahun sebagai mekanik di sebuah pabrik garmen di Tangerang. Tugas sehari-harinya adalah memeriksa kondisi mesin jahit di tiga lini produksi. EP menerima gaji bulanan sebesar Rp 3.021.000 (sekitar US$300), ditambah tunjangan transportasi, makan, dan premi asuransi senilai Rp 77.300 (sekitar US$7,7). Jadi total penghasilan bulanannya berkisar Rp 3.098.300 (sekitar US$308).

EP sudah menikah dan memiliki satu anak. Selain menjadi pencari nafkah utama dari keluarga kecilnya, ia juga menafkahi orang tuanya. Setiap bulan, pengeluaran keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar adalah sekitar Rp 4,8 juta (US$ 480). Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, EP dan istrinya harus bekerja sangat keras. EP harus bekerja ekstra sebanyak 15 - 16 jam per minggu agar dapat menghasilkan Rp 950.000 per bulan. Istri EP juga harus melakukan berbagai pekerjaan kasar, sehingga dapat memperoleh pendapatan rata-rata Rp 500.000 per bulan. Meskipun demikian, pengeluaran keluarga EP yang terbatas ini masih berada di atas tingkat pendapatan mereka.

Untuk mengatasi situasi tersebut, mereka antara lain mengorbankan beberapa kebutuhan dasar yang masuk dalam daftar KHL (kebutuhan hidup layak), yang merupakan daftar pengeluaran penting yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan pendidikan. Mereka juga membeli barang-barang berkualitas rendah untuk memastikan bahwa uang terbatas yang mereka miliki dapat sejauh mungkin memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun demikian, untuk menutupi berbagai pengeluarannya yang penting EP masih perlu berutang pada rentenir setempat.

Kisah EP merupakan kisah yang biasa dialami oleh banyak pekerja yang terpaksa berutang hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut EP, hampir 90 persen dari pekerja di pabrik tempat ia bekerja harus membayar utang dengan bunga 20 persen. Untuk pekerja pabrik, mendapatkan pinjaman dari rentenir adalah solusi termudah karena prosesnya sederhana dan mereka dapat mengakses dana dengan sangat cepat. Sebagai jaminan, pekerja harus melepaskan berbagai dokumen pribadi penting seperti kartu Jamsostek, ijazah sekolah atau dokumen kepemilikan kendaraan. Kadang rentenir menahan kartu ATM pekerja dengan PIN-nya dan mengurangi pembayaran cicilan utang bulanan setelah gaji masuk (biasanya pada tanggal 10 setiap bulan). Kartu ATM dapat dipegang oleh rentenir sampai utang telah dibayar penuh.“Lihat saja sendiri, di mesin ATM sekitar pabrik pada tanggal 10 setiap bulan, ada sejumlah orang yang menarik uang berkali-kali. Mereka itu pasti rentenir,” kata EP.

EP banyak mendengar cerita yang mengkhawatirkan dari rekan kerja yang terbelit utang pada rentenir. Beberapa dari mereka tidak memiliki akses terhadap kartu ATM mereka sendiri selama bertahun-tahun, karena setiap bulan mereka hanya dapat membayar bunganya tetapi tidak mampu membayar pinjaman pokoknya. Ada juga pekerja yang telah mengambil pinjaman dari beberapa rentenir, tetapi tidak mampu membayar mereka kembali. Para pekerja ini pada akhirnya harus berhenti bekerja karena tidak mampu menahan malu. Bagi EP serta pekerja perempuan dan laki-laki lainnya di pabrik, upah hidup layak untuk menutupi biaya hidup mereka hanya sebuah mimpi.

Bagi pekerja dengan pekerjaan berketerampilan rendah, mereka memiliki peluang yang kecil untuk naik ke jenjang pekerjaan berketerampilan lebih tinggi dan dengan gaji tinggi. Penelitian Oxfam yang dilakukan di industri garmen di empat kota pada Juni/Juli 2016 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja menjalani pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun.[113] Ketidakmampuan pekerja untuk mengembangkan keterampilan mereka merupakan suatu tantangan bagi Indonesia dalam upayanya untuk memenuhi permintaan berbagai industri yang sedang berkembang, dan beralih dari perekonomian yang didorong oleh industri ekstraktif dan sektor teknologi rendah ke industri manufaktur dan jasa teknologi tinggi. Masalah kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan juga memiliki dampak besar pada prospek kerja dari generasi muda. Menurut ILO, pengangguran di kalangan kaum muda merupakan masalah besar di Indonesia.[114]

Tingkat upah bagi mereka yang berada di posisi bawah juga merupakan masalah utama karena upah minimum regional – meskipun diberlakukan – tidak memberikan penghasilan yang cukup bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.[115] Penelitian Oxfam pada tahun 2016 menunjukkan bahwa upah minimum hanya menutupi 84,7 persen dari pengeluaran riil rumah tangga untuk daerah Tangerang, 87,2 persen untuk Bandung, 60,3 persen untuk Semarang dan 63,9 persen untuk Yogyakarta. Upah minimum dihitung berdasarkan kebutuhan dari 1,5 orang, namun sebagian besar pekerja merupakan pencari nafkah utama untuk keluarga yang beranggotakan 4–5 orang. Selain itu, dalam kasus tertentu pekerja menerima upah lebih rendah dari tingkat upah minimum regional yang telah ditetapkan pemerintah karena lemahnya penegakan hukum dan daya tawar dari pekerja, terutama di pabrik-pabrik tempat serikat buruh tidak berjalan efektif.[116] Upah yang adil bahkan lebih sulit bagi kaum perempuan, mengingat adanya ketimpangan upah antar-gender. Selain itu, kaum perempuan sering harus berhadapan dengan jam kerja yang panjang namun dibayar dengan upah rendah dan tingkat kerja pengasuhan tak berbayar yang lebih tinggi. Untuk mengurangi ketimpangan antara upah yang diterima dan kebutuhan keluarga mereka, para pekerja sering harus bekerja lembur dan anggota keluarga lainnya (termasuk pasangan dan anak-anak mereka yang lebih tua) terpaksa ikut mencari nafkah dengan bekerja atau mendirikan usaha mikro. Meskipun demikian, bagi banyak pekerja upaya ini masih tidak cukup dan mereka terpaksa meminjam dari rentenir, sehingga terjebak dalam pekerjaan yang dibayar rendah dan terperangkap dalam utang.

Keadaan kebanyakan pekerja memang buruk, namun pendapatan rendah merupakan masalah yang lebih besar lagi bagi lebih dari 55 persen tenaga kerja di sektor informal atau mereka yang bekerja sendiri, terutama di bidang pertanian serta usaha mikro dan kecil.[117] Data dari Bank Dunia pada Maret 2014 menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata pekerja lepas dan mereka yang bekerja sendiri masing-masing sebesar 51 persen dan 68 persen dari pendapatan rata-rata karyawan biasa.[118] Di samping berpenghasilan rendah, pekerja informal yang tidak memiliki kontrak kerja yang pasti, secara umum kurang memperoleh perlindungan dan akses terhadap pengembangan karir. Perempuan lebih cenderung dipekerjakan secara informal daripada laki-laki.[119]

SISTEM PERPAJAKAN YANG TIDAK ADIL

Indonesia memiliki rasio pajak terhadap PDB terendah di Asia Tenggara.

Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Koordinator untuk Bidang Perekonomian Indonesia, pajak adalah salah satu alat yang paling efektif untuk mengatasi ketimpangan,[120] baik melalui redistribusi kekayaan maupun pendapatan, dan meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk mendanai layanan publik yang vital untuk mengurangi ketimpangan. Namun, pemungutan pajak di Indonesia rendah. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan

Ekonomi (OECD) menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem administrasi perpajakan terburuk di kalangan negara-negara Asia Tenggara[121] dan memiliki rasio pajak terhadap PDB terendah kedua di Asia Tenggara (lihat Gambar 9). Target rasio pajak sebesar 12,9 persen (2016), dan 13 persen -14 persen (2017) berada jauh di bawah perkiraan IMF untuk potensi pajak Indonesia sebesar 21,5 persen dari PDB, dan di bawah rasio pajak dari negara berpenghasilan menengah ke atas yang mencapai 26,4 persen.[122] Selanjutnya, karena lemahnya administrasi pajak dan rendahnya kepatuhan wajib pajak, realisasi penerimaan pajak setiap tahun senantiasa di bawah target yang rendah ini.[123]

Gambar 9: Rasio Pajak terhadap PDB di Asia Tenggara

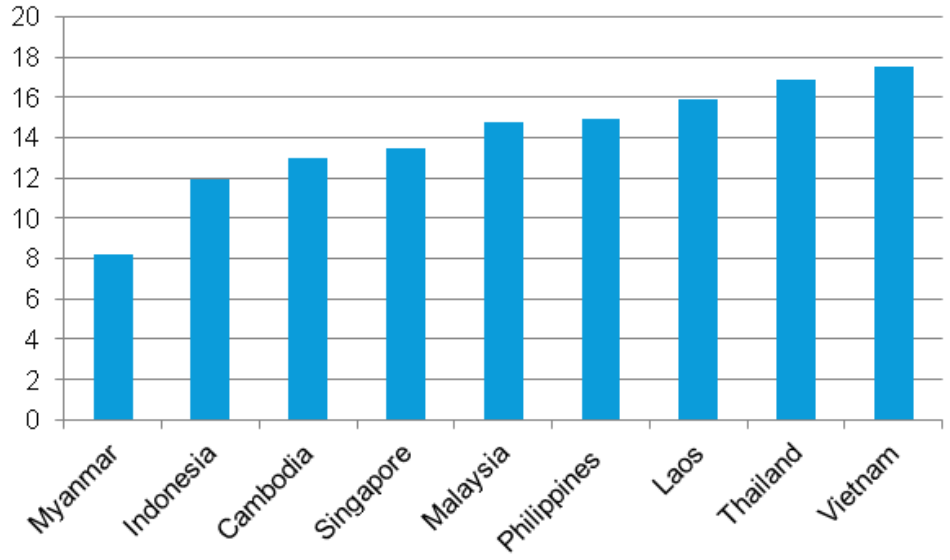

Sumber: Oxfam, *Commitment to Reducing Inequality Index* (*akan terbit*, 2017); menggunakan data terbaru yang telah dikonfirmasi.

Kemampuan sistem perpajakan untuk mengatasi ketimpangan tidak hanya dapat diukur dari jumlah pendapatan yang diterima. *Bagaimana* pendapatan tersebut diperoleh merupakan hal yang sangat penting karena sistem pajak progresif sangat berperan dalam mendistribusikan kekayaan.[124] Ada banyak ruang untuk perbaikan di Indonesia dalam hal ini. Di Indonesia, rasio pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah 1,41, lebih rendah dari negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina (1,87) dan Malaysia (3,07), yang berarti bahwa proporsi yang lebih tinggi dari jumlah pajak dinaikkan melalui perpajakan regresif tidak langsung.[125] Data data tahun 2012 menunjukkan bahwa 34,6 persen dari total penerimaan pajak dipungut dari pajak pertambahan nilai (PPN), hanya 10 persen yang diperoleh dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.[126] Meskipun total penerimaan pajak dari PPh tidak berbeda dengan negara-negara lain di kawasan ini, angkanya masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yaitu 23,5 persen.[127]

Pajak tidak langsung seperti PPN bersifat regresif karena dikenakan tarif dengan persentase tetap (*flat rate*) sehingga masyarakat miskin terpaksa membayar persentase yang lebih tinggi dari pendapatan mereka untuk jenis pajak ini. Meskipun ada beberapa pengecualian untuk kebutuhan pokok di Indonesia (termasuk beras, jagung, dan kedelai), pajak langsung adalah cara yang jauh lebih adil untuk meningkatkan pendapatan. Meskipun demikian, kemampuan mekanisme PPh orang pribadi untuk meningkatkan pendapatan terhalang oleh desainnya yang tidak membuat mereka yang berada di bagian atas dari skala pendapatan untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Tarif pajak untuk penghasilan kena pajak yang berada di lapisan atas diatur terlalu rendah, di mana orang yang berpendapatan lebih dari Rp 500 juta setiap tahun dikenakan tarif pajak 30 persen, yang berarti bahwa mereka yang berpenghasilan Rp 1 miliar dan Rp 100 miliar per tahun

membayar tarif pajak penghasilan yang sama. Tidak adanya pajak kekayaan progresif juga menjadi suatu kelemahan system pajak Indonesia. Meskipun ada pajak tanah dan bangunan, pajak warisan ditetapkan pada tarif tetap rendah 5 persen[128] dan tidak ada pajak atas kekayaan individu.[129] Selain itu ada rencana yang mengkhawatirkan untuk lebih menurunkan tarif pajak penghasilan badan usaha, yang telah berkurang dari 30 persen menjadi 25 persen dalam sepuluh tahun terakhir, [130] sehingga mencapai level yang lebih rendah lagi yaitu 17 persen.[131]

Selain itu, Indonesia, seperti negara-negara lain di kawasan ini, juga menawarkan beragam insentif pajak yang memungkinkan badan usaha untuk lebih menurunkan tarif pajak mereka.[132] Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa -tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa cara ini menguntungkan secara ekonomi. Penelitian terbaru dari Oxfam di Vietnam bahkan menemukan bahwa meskipun insentif pajak diterapkan secara meluas, hanya sedikit bukti bahwa insentif ini ikut berkontribusi pada peningkatan investasi atau pertumbuhan ekonomi. [133] Insentif pajak adalah contoh lain dari persaingan pajak regional di Asia Tenggara. Misalnya, pada tahun 2014, dalam rangka memperebutkan investasi Samsung, Indonesia menawarkan pengecualian pajak penghasilan badan usaha selama 10 tahun, sementara Vietnam menawarkan 15 tahun. [134] Dalam fenomena perlombaan ke bawah (*race to the bottom*) di tingkat regional ini, badan usaha dan para pemegang saham yang kaya adalah pihak yang diuntungkan dengan mengorbankan basis pajak negara.

Pada tahun 2014 lebih dari $100 miliar mengalir dari Indonesia ke tax haven, hampir dua kali lipat angka pada tahun 2009.

Indonesia, seperti negara-negara lain di kawasan ini, juga memiliki basis pajak yang dirusak oleh individu-individu kaya dan perusahaan yang menghindari atau mengelak pembayaran pajak secara adil. Individu kaya dan badan usaha menggunakan kawasan suaka pajak (*tax haven*) untuk menyembunyikan kekayaan dan aset mereka jauh dari jangkauan otoritas pajak Indonesia. Diperkirakan bahwa setidaknya US$ 200 miliar dari kekayaan Indonesia tersimpan di Singapura saja.[135] Lebih lanjut data dari Global Financial Integrity menunjukkan bahwa aliran modal dalam jumlah yang besar keluar dari Indonesia. Dari tahun 2004 hingga 2013, Global Financial Integrity menemukan bahwa dana senilai lebih dari US$ 180 miliar mengalir keluar dari Indonesia secara ilegal. Ini berarti bahwa Indonesia mengalami aliran uang ilegal ke-9 tertinggi di dunia selama periode tersebut.[136] Analisis baru dari data IMF oleh dilakukan Oxfam menunjukkan bahwa pada tahun 2014 lebih dari US$100 miliar mengalir dari Indonesia ke *tax haven*, hampir dua kali lipat angka pada tahun 2009.[137] . Angka untuk tahun 2014[138] ini setara dengan hampir 10 kali anggaran pendidikan pada tahun yang sama. Skala dari penggelapan pajak dibeberkan dalam Panama Papers, yaitu bocoran dokumen terbesar di dunia, yang menyebutkan hampir 3.000 individu dan perusahaan Indonesia dalam dokumen tersebut, termasuk sejumlah pihak yang paling kaya dan berkuasa di Indonesia.[139]

3. KETIMPANGAN BUKAN SESUATU YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI

Meskipun ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok lainnya mengalami peningkatan yang begitu cepat di Indonesia dalam dua dekade terakhir ini, ketimpangan ekstrem bukan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Memutarbalikkan tren ketimpangan memerlukan upaya bersama (*concerted effort*) dari pemerintah Indonesia, namun sesungguhnya hal ini telah dilakukan di berbagai negara (lihat Boks 4 di bawah). Pemerintah di bawah Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen untuk memerangi ketimpangan. Segera setelah dilantik, Presiden Jokowi berkomitmen untuk mengurangi koefisien Gini dari 0,41 pada saat itu menjadi 0,36 pada tahun 2019. Di bulan Januari tahun ini, beliau mengumumkan bahwa memberantas ketimpangan merupakan prioritas utama pemerintah di tahun 2017,[140] dengan komitmen khusus untukmemperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik".[141]

Boks 4: Pembelajaran dari Brasil

Meskipun terjadi tren global peningkatan ketidaksetaraan yang mengkhawatirkan, sejumlah negara telah berhasil mengambil tindakan untuk melawan ketidaksetaraan, dan menunjukkan bahwa dengan kemauan politik dan langkah-langkah kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menghentikan kecenderungan meningkatnya ketimpangan. Brasil memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia: misalnya, keduanya memiliki perekonomian berbasis sumber daya alam yang besar, mempunyai sistem politik yang terdesentralisasi dan Indonesia sedang dalam proses peralihan untuk menjadi negara berpenghasilan menengah atas, yang mana baru-baru ini telah dialami oleh negara Brasil.

Meskipun pada awalnya mempunyai angka ketimpangan yang tinggi, antara tahun 2001 dan 2009 Brasil mampu menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar lima poin, dari koefisien Gini sebesar 58,8 menjadi 53,7.[142] Hal ini dilakukan dengan tiga cara. Pertama adalah fokus politik yang secara terang-terangan bermaksud untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kedua, Brasil memulai upaya untuk memperluas layanan pendidikan bagi rumah tangga miskin, sehingga lebih banyak pekerja yang memiliki keterampilan dan karena itu menerima upah yang lebih tinggi. Hal ini juga mengurangi jumlah pekerja tidak terampil dan mendorong naik upah mereka. Selain itu, antara tahun 2003 dan 2016, Brasil meningkatkan upah minimum sebesar 77 persen di atas inflasi, disertai semakin banyak terciptanya pekerjaan formal.[143] Diperkirakan mengecilnya perbedaan upah antara pekerja terampil dan tidak terampil menyumbang dua pertiga dari pengurangan ketimpangan.[144]

Ketiga, terdapat perluasan program bantuan sosial yang inklusif dan program dana pensiun universal. Program ini termasuk program unggulan Brasil yang memberikan bantuan tunai bersyarat (Bolsa Familia), program pensiun non-iuran untuk orang tua miskin (Benefício de Prestação Continuada) dan program bantuan susu. Potensi kebijakan-kebijakan ini untuk meningkatkan kesetaraan akan berlipat ganda jika digabungkan dengan kebijakan lain, terutama kebijakan pajak progresif. Sayangnya, hal ini tidak terjadi. Selain itu, meskipun terdapat bukti yang jelas bahwa belanja sosial dapat membantu untuk menurunkan ketimpangan di Brasil, peraturan baru untuk membekukan belanja sosial selama 20 tahun akan melemahkan upaya untuk memerangi ketidaksetaraan. [145]

Pemerintah saat ini telah mengambil berbagai langkah positif untuk mengurangi ketimpangan. Dimulainya proses penganggaran berbasis gender akan membantu mengatasi ketidaksetaraan gender dengan memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam pengambilan keputusan anggaran sehingga anggaran lebih dapat menampung kebutuhan perempuan, dan pengeluaran untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dapat diprioritaskan. Selanjutnya, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah menuju jaminan layanan kesehatan universal (UHC) untuk Indonesia melalui skema jaminan kesehatan nasional yang baru. Baru-baru ini menurunnya ketimpangan pendapatan merupakan sebuah sinyal yang menjanjikan bahwa gelombang ini mulai menurunkan ketimpangan yang ekstrem di Indonesia, tetapi belum jelas apakah ini tren jangka panjang. Masih banyak hal yang dapat dan harus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia secara berkelanjutan. Selain menambah tantangan baru untuk menyelesaikan masalah ini, konteks politik dalam hal desentralisasi juga memberikan kesempatan untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dapat bersifat responsif terhadap konteks lokal.

Baru-baru ini pemerintah meluncurkan Kebijakan Keadilan Ekonomi yang mencakup berbagai langkah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi ketimpangan.[146] Paket ini termasuk kebijakan yang terkait dengan lahan yang bertujuan meningkatkan dan mempercepat redistribusi lahan melalui hak kepemilikan formal dan meningkatkan akses terhadap kredit,[147] meningkatkan akses terhadap lahan bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan dan pedesaan. Paket ini juga bertujuan memberikan akses yang sama terhadap pasar tenaga kerja dan pekerjaan yang memberi rasa aman dengan meningkatkan kesempatan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan. Akses terhadap kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah juga akan ditingkatkan. Selanjutnya, paket ini termasuk rencana untuk menerapkan pajak progresif atas tanah yang tidak digunakan untuk menghasilkan tambahan pendapatan dan mencegah spekulan tanah.[148] Hal ini dikombinasikan dengan rencana untuk mengenakan pajak keuntungan modal atas penjualan tanah.[149] Meskipun terlalu dini untuk menilai apakah kebijakan ini akan berhasil dalam menanggulangi ketimpangan yang ekstrem, paling tidak kebijakan ini memberi janji nyata, dan menunjukkan komitmen pemerintah yang berkelanjutan untuk menanggulangi masalah ketimpangan.

Meskipun demikian, pemerintah dapat dan harus melakukan upaya lebih lanjut. Masih ada banyak ruang untuk menggunakan kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja publik) untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok lain. Kebijakan fiskal di Indonesia saat ini memiliki dampak yang sangat kecil pada pengurangan ketimpangan (lihat Gambar 10). Total pajak dan transfer mengurangi ketimpangan hanya sebesar 2,5 poin di Indonesia, sedangkan di Brasil misalnya, koefisien Gini untuk *market income* (laba sebelum pajak dan transfer) sebesar 14 poin lebih tinggi daripada pendapatan final. Hal ini menunjukkan penurunan ketimpangan yang sangat besar sebagai akibat dari kebijakan fiskal. [150] Selanjutnya, dengan mendinginnya ekonomi global dan kekhawatiran akan terjadinya krisis fiskal di Indonesia, tiba saatnya bagi pemerintah untuk memperkenalkan langkah-langkah reformasi agar lebih meningkatkan pendapatan pajak secara progresif, dan memastikan bahwa pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan publik dan pendidikan yang berkualitas.

Gambar 10: Dampak Pajak dan Belanja untuk Layanan Publik terhadap Ketimpangan di Berbagai Negara

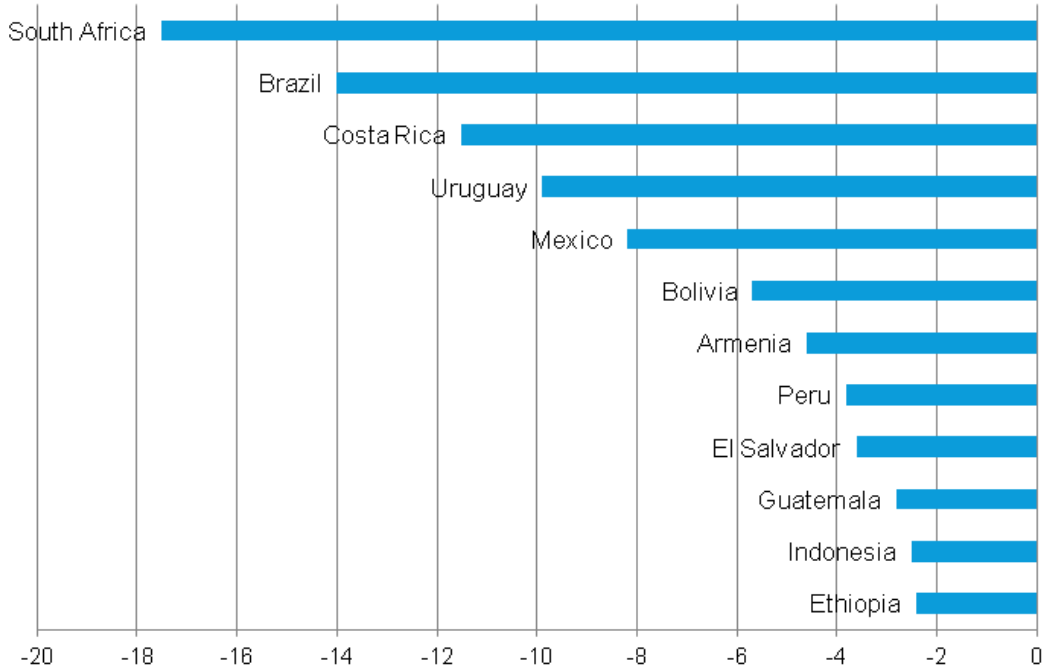

Sumber: Bank Dunia (2015). *Pajak dan Belanja Publik di Indonesia: Siapa yang Membayar dan Menikmati?*

Anggaran pemerintah untuk tahun 2017 ditetapkan untuk mengurangi ketimpangan dengan menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan pekerja; meningkatkan akses terhadap layanan dasar, serta menjamin perlindungan ketika terjadi guncangan dan gejolak. [151] Hal ini diharapkan dapat menurunkan koefisien Gini menjadi 0,38 pada tahun 2017. Bagian berikutnya dari laporan ini menjabarkan rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintah untuk dapat untuk dapat melakukan hal di atas: dengan cara memastikan pekerjaan an upah yang adil; meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak progresif yang digunakan untuk meningkatkan belanja public; meningkatkan investasi di pelayanan kesehatan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan juga produktivitas serta mengurangi pengeluaran masyarakat yang amat sangat besar; dan berinvestasi untuk perbaikan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan. Pemerintah sudah berada dalam jalur yang tepat untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang sudah mengkhawatirkan. Dengan tekad politik dan pilihan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat berpegang pada komitmennya untuk membalikkan tingkat ketimpangan yang sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan ini dan memastikan masa depan yang sejahtera dan lebih setara bagi Indonesia.

PEKERJAAN DAN UPAH YANG ADIL

Meningkatkan tingkat upah minimum menuju upah hidup layak dan memastikan pemberlakuannya, serta menjajaki usulan atas upah hidup layak di setiap negara anggota ASEAN

Meskipun berbagai tekanan dari serikat pekerja telah berhasil mendorong perbaikan besar dalam meningkatan upah minimum nasional[152], puluhan juta pekerja masih menerima upah yang tidak mencukupi untuk menutupi biaya hidup dasar mereka. Pekerja seharusnya tidak bekerja berjam-jam dan terbelit utang untuk menutupi biaya hidup mereka. Karena upah minimum di Indonesia ditetapkan di tingkat daerah, ada perbedaan tingkat upah minimum

antar-daerah, dan daerah yang berada di posisi paling bawah mempunyai tingkat upah minimum terendah di ASEAN.[153]

Boks 5: Upah hidup layak – definisi

Upah hidup layak (*living wage*), secara singkat berarti upah yang dapat menghidupi seorang pekerja dan keluarganya – yang cukup untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, pendidikan, transportasi dan makanan – dan masih memungkinkan bagi pekerja untuk sedikit menabung. Upah hidup layak:

- Harus ditetapkan dengan melibatkan para pekerja.
- Cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, transportasi dan menabung.
- Cukup untuk menyisakan uang berlebih (*discretionary income*) setelah pendapatan dikurangi pajak dan segala keperluan ataupun kebutuhan mendasar untuk hal-hal yang tidak terduga seperti kecelakaan atau sakit.
- Menghidupi orang lain selain pekerja perseorangan – merupakan upah keluarga.
- Mempertimbangkan jumlah jam yang diperlukan untuk memperoleh upah hidup layak – tidak lebih dari 48 jam per minggu.
- Mencakup berbagai siasat untuk memperbarui tingkat upah secara berkala agar pekerja dapat mempertahankan daya beli relatif mereka.

Pekerja (baik domestik maupun migran) di semua wilayah dan sektor, formal ataupun informal, seharusnya mendapatkan upah hidup layak. Pemerintah Indonesia harus mengikuti jejak negara-negara lain di kawasan ini dan berupaya meningkatkan upah minimum. Pada tahun 2016, Malaysia menaikkan upah minimum di berbagai daerah dengan maksimum kenaikan sebesar 15 persen.[154] Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk meningkatkan upah minimum hingga mencapai standar upah hidup layak, menyusun *road map* untuk melakukan hal tersebut dengan melakukan dialog dengan para pekerja dan serikat pekerja. Dunia usaha harus mendukung inisiatif ini serta menerapkan berbagai kebijakan dan praktik yang mengarah pada pencapaian upah hidup layak dalam usaha mereka.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa tingkat upah minimum dapat diberlakukan. Peran dari serikat buruh yang kuat dan efektif sangat penting dalam menentukan upah yang adil dan layak yang mendekati upah hidup layak serta untuk mendukung pemberlakuan tingkat upah tersebut. Oxfam telah bekerja selama lebih dari satu dekade dengan serikat pekerja serta perusahaan pakaian olahraga internasional dan pemasok mereka untuk memastikan pemenuhan hak pekerja untuk berserikat, dan bukti yang ada menunjukkan bahwa di perusahaan yang terdapat serikat buruh yang kuat dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka hak-hak pekerja akan lebih terlindungi.

Wakil Presiden Indonesia baru-baru ini mengimbau negara anggota ASEAN untuk mengadopsi standar upah minimum regional untuk mencegah persaingan tingkat upah yang tidak sehat di ASEAN. [155] Inisiatif ini dapat membantu untuk mengatasi fenomena *race to the bottom* dalam hal upah di ASEAN, di mana negara-negara anggota bersaing untuk menawarkan upah rendah kepada investor. Jika upah hidup layak digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar upah minimum regional, maka akan menjamin penghasilan pokok bagi jutaan warga di wilayah ini. Meskipun demikian, kemampuan ASEAN untuk

benar-benar memberlakukan upah minimum regional masih dipertanyakan. Selain itu, harus ada konsensus regional antara para pemimpin ASEAN yang mungkin merupakan hal yang sulit untuk dicapai.[156] Selanjutnya, mengingat beragamnya tingkat upah minimum di ASEAN, pekerja di negara yang berada pada bagian teratas dari skala gaji mungkin tidak akan terpengaruh. Upah hidup layak untuk seluruh negara anggota perlu dikaji lebih mendalam lagi dengan melibatkan serikat buruh.

Mengatur jaminan ketenagakerjaan

Perjanjian kerja yang memberikan kepastian (*secured employment*) membawa sejumlah manfaat bagi pekerja. Antara lain, pekerja dapat menuntut berbagai haknya dari majikan, memperoleh jaminan sosial dari pemerintah, dan mengangkat posisi pekerja sehingga lebih diperhitungkan, yang berarti bahwa mereka lebih mungkin untuk terlibat dan didukung oleh serikat pekerja, organisasi buruh, dan lembaga swadaya masyarakat. Perjanjian kerja yang pasti juga dapat berfungsi sebagai jaminan, memungkinkan orang untuk mempunyai tempat tinggal dan rekening bank sehingga mereka mampu untuk berencana dan menabung, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan rumah tangga terhadap guncangan.[157] Perjanjian kerja yang pasti juga memberi banyak manfaat untuk bisnis, termasuk berkurangnya perputaran atau keluar-masuknya karyawan (*worker turnover*), lebih sedikit waktu manajemen yang dihabiskan untuk perekrutan, serta produktivitas dan kualitas produk yang lebih baik.

Pemerintah telah mengatur bahwa semua pekerja yang merupakan bagian dari kegiatan inti suatu badan usaha harus diperlakukan sebagai pekerja formal.[158] Namun, dalam kenyataannya banyak pekerja yang dipekerjakan sebagai pekerja lepas, sehingga mereka kurang memiliki rasa jaminan kerja (*job security*). Pemerintah harus berusaha untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan harus bersifat permanen, terbuka dan langsung, dan setiap penyimpangan dari norma ini harus dapat dipertanggungjawabkan, direncanakan, terbatas dan diatur. Pemerintah harus mengatur sedemikian rupa sehingga dapat mencegah pihak pemberi kerja dari praktik-praktik diskriminatif dan terlalu berlebihan dalam menggunakan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*), pekerja kontrak waktu tertentu atau pekerja yang direkrut melalui kontrak kerja yang tidak pasti. Pemerintah juga perlu mensyaratkan transparansi atas proporsi pekerja dengan perjanjian kerja permanen secara pasti. Selanjutnya, pemerintah harus mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memastikan bahwa semua pekerja dapat menggunakan hak-hak mereka, terutama yang terkait dengan kebebasan berserikat dan kesepakatan kerja bersama. Pemerintah juga harus mempunyai suatu mekanisme verifikasi independen terhadap pihak pemberi kerja yang cukup andal jika pekerja yang paling rentan mempercayai dan memanfaatkannya. “Pekerja yang paling rentan” tersebut mencakup: pekerja rumah tangga, pekerja *outsourcing*, pekerja sementara atau pekerja dengan kontrak kerja yang tidak pasti, seperti untuk pekerjaan dengan jam kerja tidak menentu yang ditentukan oleh pemberi kerja dan bukan pekerja. Sektor swasta harus mengambil inisiatif untuk meningkatkan jumlah pekerja dengan perjanjian kontrak kerja yang memberikan rasa aman dan memastikan bahwa pekerja dengan kontrak kerja yang tidak pasti dapat mengakses hak-hak dasar pekerja.

Mengurangi ketimpangan upah antar-gender dan menghapus hambatan terhadap partisipasi setara perempuan dalam angkatan kerja

Ketimpangan upah antar-gender di Indonesia mencapai 14,5 persen, jauh lebih tinggi dari Thailand (2,8 persen) dan Malaysia (3,9 persen).

Pekerja perempuan masih mengalami diskriminasi di tempat kerja dalam perkara gaji dan pemenuhan hak-hak lain. Ketimpangan upah antar-gender di Indonesia mencapai 14,5 persen, jauh lebih tinggi dari Thailand (2,8 persen) dan Malaysia (3,9 persen).[159] Pengurangan jurang upah ini dapat memberi sejumlah manfaat bagi dunia usaha – yang mencakup tingkat retensi (mempertahanakan) pekerja yang lebih tinggi, peningkatan semangat kerja, dan pemanfaatan keterampilan yang lebih efektif[160] – maupun bagi masyarakat secara lebih luas dengan terciptanya masyarakat yang lebih setara dan kohesif, serta meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.[161] Pemerintah bertekad untuk mengurangi ketimpangan upah gender, termasuk melalui pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang bertujuan memberikan akses yang sama kepada pekerja perempuan dan pekerja laki-laki terhadap pekerjaan dan memastikan bahwa mereka akan menerima tingkat upah yang sama. Pemberi kerja harus mengungkapkan ketimpangan upah di antara gender mereka dan mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk menghapus segala hal yang meghambat partisipasi perempuan yang setara dalam angkatan kerja, antara lain dengan menjamin akses terhadap pekerjaan yang layak dan aman untuk kaum perempuan, memastikan perlakuan yang tidak diskriminatif di tempat kerja, dan memajukan hak-hak perempuan untuk berorganisasi dan berperan aktif dalam serikat pekerja. Selain itu, pemberi kerja dapat menyediakan fasilitas dan menjamin hak-hak yang mendukung pekerja perempuan seperti ruang menyusui, fasilitas penitipan anak, dan cuti bersalin berbayar.

Mendorong norma-norma sosial dan sikap yang positif terhadap pekerjaan perempuan juga merupakan faktor penting. Sebagaimana yang terjadi di banyak negara, perempuan lebih banyak menanggung beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan[162] yang tak berbayar, namun berbagai peran ini sering tidak dihargai. Besarnya beban pekerjaan pengasuhan tak berbayar ini membatasi pilihan yang tersedia bagi kaum perempuan, dan merupakan faktor penyumbang yang kuat terhadap partisipasi perempuan yang lebih rendah dalam angkatan kerja, serta lebih terpusat pada pekerjaan paruh waktu yang dibayar rendah. Pemerintah dan masyarakat sipil harus bekerja sama dengan masyarakat setempat serta tokoh masyarakat adat dan pemuka agama untuk mendobrak paradigma bahwa perempuan itu tempatnya di rumah dan mengurus keluarga. Mendorong dan meningkatkan kesadaran kaum laki-laki untuk ikut menanggung beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak akan sangat membantu untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

PAJAK PROGRESIF

Sistem perpajakan progresif sangat penting untuk melawan ketidakadilan, melalui peningkatan pendapatan yang memadai untuk diinvestasikan ke dalam layanan publik yang dirancang untuk menghapus ketimpangan, serta melalui pengurangan ketimpangan pendapatan dan kekayaan secara langsung. Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk memperbaiki sistem pajak yang ada dengan tujuan meningkatkan penerimaan dan mendistribusikan kekayaan. Hal ini juga akan membantu dalam membangun kontrak sosial yang penting antara warga dan negara.

Meningkatkan Rasio Pajak terhadap PDB

Sebagaimana telah dibahas, Indonesia memiliki tingkat mobilisasi pendapatan negarayang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Hal ini berarti masih teradapat banyak peluang untuk memperluas ruang fiskal. Hal ini diakui secara jelas oleh pemerintah: setelah Presiden Jokowi menjabat beliau menyatakan bahwa inisiatif utama pemerintah adalah memperluas penerimaan pajak, dari di bawah 12 persen menjadi 16 persen dari PDB.[163] Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menekankan pentingnya meningkatkan rasio pajak terhadap PDB di Indonesia:

> *'Angka-angka menunjukkan bahwa jika kita membuat perpajakan dengan lebih efektif, maka kita dapat mengambil uang dari mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang lebih baik dan mendistribusikannya untuk belanja negara yang berpihak kepada mereka yang berada pada kelompok di bawah 40 persen. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bahkan bantuan uang tunai dapat didistribusikan kepada kalangan miskin'.*[164]

Jika Indonesia dapat mencapai kapasitas pajak sepenuhnya, pada tahun 2015 seharusnya dapat mengumpulkan tambahan dana $63 miliar untuk investasi di layanan

Meskipun komitmen untuk meningkatkan penerimaan pajak Indonesia patut dihargai, pemerintah harus bergerak lebih maju lagi dan meningkatkan rasio pajak sebanyak 21,5 persen dari PDB[165], yaitu angka yang dianggap IMF sebagai potensi pajak Indonesia. Jika Indonesia dapat mencapai kapasitas pajak sepenuhnya sebagaimana yang diproyeksikan oleh IMF, pada tahun 2015 Indonesia seharusnya dapat mengumpulkan tambahan dana sebesar Rp 836 triliun ($63 miliar) untuk diinvestasikan ke dalam layanan publik yang bertujuan menghapus ketimpangan[166], yang cukup untuk meningkatkan anggaran belanja kesehatan sebesar 9 kali lipat.[167]

Mereformasi Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang ada belum mampu mendistribusikan kekayaan dan memastikan bahwa setiap orang membayar sesuai dengan kemampuannya. Jenis pajak yang dikenakan perlu beralih dari pajak regresif tidak langsung ke pajak progresif langsung. Saat ini, pemerintah berencana untuk mengurangi tarif PPh[168] orang pribadi, Meskipun demikian penurunan tarif pajak tidak selalu berarti meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan penerimaan. Sebagai gantinya, kode PPh orang pribadi perlu diperbarui untuk memastikan bahwa golongan super kaya membayar tarif pajak yang lebih tinggi daripada golongan lainnya karena mereka yang paling mampu. Pemerintah juga harus memastikan agar sistem PPh orang pribadi diberlakukan.

Tabel 2: Kode Pajak Pendapatan Pribadi di Indonesia, yang berwarna merah adalah usulan perubahan

Pendapatan kena Pajak (IDR)	Tingkat (%)
Up to 50,000,000	5
50,000,000–250,000,000	15
250,000,000–500,000,000	25
500,000,000 – 10 milyar	30
Di atas 10 milyar	**45**

Dalam jangka pendek, pemerintah harus mengenakan menambah tarif pajak dengan 45 persen untuk sistem pajak penghasilan perseorangan untuk memastikan bahwa mereka yang 'super-kaya', yang didefinisikan sebagai mereka yang berpenghasilan lebih dari Rp 10 miliar, membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka. Golongan ini mencakup kalangan eksekutif, manajemen puncak, pemilik dan pemegang saham dari beberapa

perusahaan terbesar di Indonesia. Tarif teratas 45 persen dari pajak penghasilan ini diterapkan di negara-negara G-20 yang lain, seperti Inggris, sementara negara maju lainnya mengadopsi tarif pajak teratas lebih tinggi, seperti Belgia (50 persen) dan Denmark (51,5 persen).[169] Dalam jangka panjang, pemerintah harus melakukan peninjauan sistem pajak penghasilan pribadi dengan tujuan mengenakan pajak tambahan bagi kalangan puncak tersebut dengan tarif lebih tinggi. Misalnya, kisaran penghasilan antara si kaya dan superkaya dapat ditentukan dan tarif pajak untuk mega-kaya bisa lebih tinggi dari itu daripada orang kaya biasa. Kisaran bisa antara Rp 500.000 dan Rp 5 miliar per tahun untuk orang kaya, yang akan membayar dengan tarif pajak 45 persen. Tarif 65 persen kemudian dapat diterapkan untuk mereka yang berpenghasilan lebih dari Rp 10 miliar per tahun. Ekonom seperti Anthony Atkinson telah menyarankan tarif pajak untuk superkaya secara optimal sebesar 65 persen.[170]

Memberlakukan Pajak Kekayaan Progresif

Pajak atas kekayaan, termasuk pajak rutin *(recurrent taxes)* pada kekayaan dan properti serta pajak harta warisan, merupakan instrumen penting untuk mengatasi masalah ketimpangan karena bersifat sangat progresif, yang hanya membidik kelompok terkaya di masyarakat. Selain itu, jenis pajak ini sangat penting untuk mencegah pemusatan kekayaan dan kekuasaan yang berlebihan di tangan segelintir orang,[171] serta untuk memastikan kesetaraan peluang bagi semua generasi.

Di negara-negara OECD, pajak kekayaan rata-rata menyumbang hampir 2 persen dari PDB. Sebaliknya, di kawasan Asia dan Pasifik pajak kekayaan hanya memainkan peran yang marginal. Dari semua negara berkembang di kawasan ini, hanya Cina yang berhasil mengumpulkan lebih dari 0,5 persen dari PDB untuk pajak properti, sedangkan pajak harta warisan hanya ada di beberapa negara.[172] Meskipun terdapat kesulitan dalam memungut pajak kekayaan di negara-negara Asia Tenggara,[173] beberapa negara berkembang berpenghasilan menengah ke atas di wilayah ini terus berupaya untuk mendapatkan manfaat dari pajak kekayaan. Misalnya, Thailand memperkenalkan pajak harta warisan untuk pertama kalinya pada tahun 2016. Meskipun tidak seambisius dari yang diharapkan,[174] negara tersebut terus giat menggunakan pajak kekayaan untuk mengurangi ketimpangan yang semakin melebar di negeri tersebut. Cina juga berencana memperkenalkan pajak properti dan pajak harta warisan pada tahun-tahun mendatang.

Di Indonesia, satu-satunya pajak kekayaan yang dikenakan saat ini adalah pajak bumi dan bangunan, yang dibayarkan setiap tahun atas tanah, bangunan dan struktur permanen, dengan tarif tertinggi biasanya tidak lebih dari 0,3 persen, meskipun besarnya bervariasi antar-kabupaten. Indonesia memang memungut pajak harta warisan namun pada tarif tetap yang rendah sebesar 5 persen. Meskipun tarif pajak ini sama dengan yang diberlakukan di Thailand, negara lain di Asia telah menetapkan tarif pajak harta warisan yang lebih tinggi, misalnya 55 persen di Jepang dan 50 persen di Korea Selatan. [175] Ada alas an kuat untuk meningkatkan tingkat pajak atas warisan berdasarkan landasan kesetaraan antar-generasi, dan pajak ini juga secara ekonomi menghasilkan distorsi yang lebih kecil daripada pajak-pajak yang lain.[176] Tidak ada pajak lain yang dikenakan atas modal atau aset yang dikumpulkan, seperti pajak kekayaan bersih.[177] Pemerintah Indonesia harus mulai melakukan peninjauan ulang sistem perpajakan kekayaan yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak atas tanah dan properti bagi tanah dan properti yang bernilai tinggi, meningkatkan tarif pajak harta warisan, dan memperkenalkan pajak kekayaan bersih untuk mengatasi masalah ketimpangan. [178] Hal ini dapat memastikan dibangunnya suatu sistem pajak kekayaan progresif yang dapat membuat golongan terkaya di Indonesia ikut berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka.

Memastikan Setiap Orang Membayar Pajak Secara Adil

Google dapat dihadapkan pada tagihan pajak sebesar lebih dari $400 juta untuk tahun 2015 saja jika terbukti menghindari pajak.

Penghindaran dan penggelapan pajak oleh individu dan perusahaan kaya dapat memperkecil basis pajak di Indonesia. Berbagai indikasi akhir-akhir ini yang menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional patut dihargai. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menyelidiki Google dengan tujuan mengklaim tunggakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir. Google dapat dihadapkan pada tagihan pajak sebesar lebih dari $400 juta untuk tahun 2015 saja jika terbukti menghindari pajak.[179] Meskipun demikian, upaya untuk memberantas penghindaran pajak oleh perseorangan lebih difokuskan pada program amnesti pajak yang dimulai pada Juli 2016. Program ini mengikuti kebijakan *'sunset policy'* pada tahun 2008 ketika pemerintah yang sebelumnya memberikan penghapusan sanksi selama satu tahun bagi wajib pajak agar melaporkan penghasilan kena pajak sebelumnya yang tidak terdaftar.[180] Berlaku hingga Maret 2017, pengampunan pajak menetapkan tarif pajak yang terlalu rendah sebesar 2–5 persen dan 4–10 persen yaitu hanya sepertiga dari tarif normal, bagi mereka yang mengungkapkan harta kekayaan yang sebelumnya tidak dilaporkan dan membawa uangnya masuk kembali ke Indonesia. Program ini menuai kritik dari OECD[181] dan masyarakat sipil, yang menganggap amnesti pajak terlalu bermurah hati sehingga menjadi semacam penghargaan untuk orang-orang kaya yang telah menyembunyikan uang mereka, dan juga meyakini bahwa program ini menghambat pelaksanaan yang efektif dari peraturan perpajakan di Indonesia. Selain itu, ada pembicaraan tentang rencana pemerintah untuk menghadirkan *tax haven* di Indonesia, dengan maksud membebaskan pajak untuk 5 industri 'pelopor'. [182] Rencana untuk menciptakan *tax haven* di Indonesia ini bertentangan dengan prinsip G-20 tentang transparansi, dan akan merusak kerja sama regional dan basis pajak Indonesia sendiri.

Indonesia telah mengambil langkah yang positif ketika menandatangani standar pelaporan umum (CRS, *common reporting standard*) dari pertukaran informasi otomatis (AIE, *automatic information exchange*), yang akan mulai berlaku pada tahun 2018, dan akan mengandung arti bahwa Indonesia akan berbagi informasi pajak dan transaksi keuangan dengan otoritas pajak lainnya, dan sebaliknya menerima informasi yang serupa, sehingga menyulitkan kalangan kaya Indonesia untuk menyembunyikan aset mereka dari pihak berwenang di Indonesia. Namun mereka yang mengikuti program amnesti pajak akan dapat memindahkan uang mereka terlebih dahulu ke Indonesia tanpa terkena sanksi apa pun.

Pemerintah Indonesia harus mengembangkan rencana aksi nasional untuk memerangi penggelapan dan penghindaran pajak. Hal ini harus diikuti oleh pembentukan suatu gugus tugas untuk menangani perusahaan multinasional dan golongan ultrakaya dalam rangka mengurangi aliran dana ilegal, di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, pemerintah harus mempercepat pembentukan sistem administrasi terintegrasi yang menyatukan seluruh koridor/portal kementerian/lembaga dan satuan tugas khusus dari KPK, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kepolisian dan kejaksaan untuk mengatasi aliran uang ilegal.

Mempertahankan Tarif Pajak Badan Usaha dan Meninjau Ulang Insentif Pajak

Pemerintah perlu membatalkan rencana untuk memangkas tarif pajak penghasilan badan usaha dari 25 persen menjadi 17 persen.[183] Penurunan tarif pajak perusahaan dapat menjadi kontra-produktif karena tarif yang lebih rendah tidak selalu berarti meningkatnya

kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya penerimaan secara signifikan. Selain itu, tidak ada bukti kuat bahwa penurunan tarif pajak akan meningkatkan penanaman modal asing (PMA). Berbagai penelitian menyebutkan sejumlah faktor yang lebih penting dalam menarik masuk PMA, antara lain tingkat keterampilan di dalam negeri, ketersediaan infrastruktur, dan stabilitas makroekonomi.[184] Kesemua faktor ini bergantung pada negara dengan sumber daya yang memadai agar dapat berinvestasi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Penurunan pajak penghasilan badan usaha akan semakin mengurangi kapasitas fiskal di Indonesia untuk membiayai program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Selain itu, hal ini akan mendorong pemerintah lain di kawasan ASEAN[185] untuk meningkatkan daya saing mereka dengan menurunkan tarif pajak mereka, sehingga memicu fenomena *race to the bottom* di mana sesungguhnya semua negara akan dirugikan.[186] Sudah ada kekhawatiran terhadap terjadinya 'perang pajak' di kawasan ASEAN ketika negara-negara berlomba menawarkan tarif pajak penghasilan badan usaha yang lebih rendah dan insentif pajak yang lain, yang kemudian mengarah pada *race to the bottom* sehingga menguntungkan perusahaan multinasional dengan mengorbankan pihak lain.[187]

Hampir semua negara di kawasan ASEAN memberikan insentif pajak. Insentif pajak dapat memainkan peran positif dalam menarik investasi, atau membantu negara untuk membentuk sistem ekonominya. Meskipun demikian, dalam banyak kasus hanya ada sedikit bukti bahwa insentif pajak memberikan manfaat ekonomi. Insentif pajak sering diberikan kepada perusahaan tanpa pengungkapan atau pengawasan parlemen atau publik. Akibatnya, insentif pajak sering tidak efektif dan biasanya dikaitkan dengan penyalahgunaan dan korupsi. [188] Pemerintah Indonesia harus mensyaratkan penilaian ekonomi dan risiko yang ketat atas semua insentif pajak yang baru (termasuk kontribusinya terhadap *race to the bottom* di tingkat global dan regional). Semua insentif harus dievaluasi secara rutin untuk membatasi manfaat pribadi dan kerugian masyarakat dalam jangka panjang, dan segala bentuk pengecualian pajak harus dihapus bilamana tidak ada bukti yang jelas akan keefektifannya.

Bekerja di Tingkat Regional untuk Kerja Sama Perpajakan

Peningkatan kerja sama perpajakan dan koordinasi di tingkat regional akan menguntungkan semua negara di kawasan ini, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu perekonomian terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran utama dalam memfasilitasi kerja sama regional dalam masalah pajak.

Tersedia berbagai peluang untuk mengatasi masalah penghindaran pajak yang semakin meluas di tingkat regional. Indonesia perlu memastikan bahwa perpajakan merupakan bagian dari agenda ASEAN untuk mengatasi masalah aliran uang ilegal, dan secara lebih aktif membina kerja sama dengan negara anggota ASEAN untuk bertukar data dan informasi, mengevaluasi perjanjian pajak dan pelanggaran atas kewajiban sesuai dengan perjanjian pajak. Indonesia dapat mendorong ASEAN untuk menyetujui rencana aksi regional yang bertujuan mengatasi masalah penghindaran pajak. Kerja sama yang erat diperlukan untuk mencegah *transfer pricing* dan bentuk penghindaran pajak lainnya di wilayah ini. Pemerintah Indonesia harus berusaha untuk memastikan agar semua negara di kawasan ini mengikuti contohnya dalam mematuhi standar pelaporan umum (CRS) tentang pertukaran informasi otomatis (AIE). Indonesia juga dapat mendorong ASEAN untuk menetapkan pedoman dan kriteria dalam situasi ketika insentif pajak dan pembebasan pajak dapat diterima untuk membatasi persaingan antara negara-negara ASEAN dalam pemberian insentif pajak

Kerangka kerja sama lain yang dapat dikembangkan negara-negara ASEAN adalah Rencana Aksi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yang diperkenalkan pada Juli 2013 oleh OECD yang bertujuan menanggulangi masalah penghindaran pajak oleh badan usaha.[189] Pelaksanaan Rencana Aksi BEPS sedikit banyak dapat membantu dalam mengurangi penghindaran pajak oleh badan usaha di ASEAN, namun BEPS belum dapat berbuat lebih banyak dalam memperbaiki sistem perpajakan badan usaha internasional yang telah rusak. Indonesia harus bergabung dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN untuk mengembangkan kerangka kerja yang melampaui BEPS. Mereka harus menggunakan bagian-bagian dari kerangka kerja BEPS yang inklusif yang bermanfaat di tingkat nasional, sambil mendorong generasi kedua dari reformasi pajak internasional, yang akan dilakukan oleh Badan Perpajakan Dunia di bawah PBB.[190]

ANGGARAN BELANJA PUBLIK

Menghapus semua premi jaminan kesehatan menuju sistem kesehatan nasional yang didanai sepenuhnya oleh pajak

Hanya dalam satu tahun skema Thailand Universal Coverage mencapai hampir 100 persen.

Investasi publik bagi layanan kesehatan adalah instrumen utama yang dapat digunakan Indonesia untuk menghapus ketimpangan antara kalangan kaya dan kalangan lainnya serta untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini juga penting untuk mencapai Tujuan 3 dari SDGs yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua.[191] Hal ini juga tampak dari negara-negara Asia, [192] misalnya di Thailand, yang telah mengambil sejumlah langkah untuk mencapai jaminan kesehatan universal, yang berarti bahwa pengeluaran rumah tangga untuk 10 persen rumah tangga termiskin berkurang dari 5 persen pada tahun 2000 menjadi 2,8 persen pada tahun 2002, dan hanya dalam rentang waktu sepuluh tahun jumlah penduduk tanpa jaminan kesehatan turun dari 30 persen menjadi kurang dari empat persen dari total penduduk. [193] Yang penting, ketimpangan antara kaya dan miskin telah dikurangi melalui belanja untuk layanan kesehatan. [194]

Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi meluncurkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang bertujuan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan Ibu Kota dan memberikan layanan kesehatan gratis bagi 4,7 juta warga miskin Jakarta. Dengan kartu tersebut, pemegang kartu berhak atas pengobatan gratis di puskesmas dan rumah sakit. Meskipun bukan tanpa kekurangan[195], termasuk rumah sakit yang bekerja keras untuk mengatasi semakin tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan investasi yang diperlukan, kehadiran program ini berarti bahwa bertambahnya ribuan warga Indonesia yang mampu mengakses layanan kesehatan. Tidak seperti sebelumnya, warga kini tidak perlu lagi membuktikan berapa banyak pendapatan mereka melalui suatu proses panjang, yang seringkali memaksa warga menyuap petugas.[196]

Berkat langkah-langkah pembaruannya di Jakarta, Jokowi telah mencapai berbagai kemajuan menuju pencapaian jaminan kesehatan universal (UHC) dengan meluncurkan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk menjangkau seluruh penduduk. Program ini bertujuan menyediakan layanan kesehatan dasar bagi semua pada tahun 2019. JKN telah sukses diluncurkan dan kini menjadi sistem kesehatan dengan pembayar tunggal terbesar di dunia. Dengan mengumpulkan semua sumber daya untuk kesehatan, pemerintah bias memaksimalkan potensi untuk kesetaraan (equity), dengan subsidi maksimum dari kaya ke miskin dan dari sehat ke sakit, tanpa memperhatikan status pekerjaan atau pendapatan. Sebagai bagian dari skema UHC, layanan kesehatan untuk orang miskin atau hampir miskin akan di bayarkan secara penuh oleh pemerintah.

Meskipun adanya potensi tersebut, kebijakaan dan tingkat pendanaan saat ini sangat membatasi pelaksaaan reformasi kesehatan yang ambisius ini. Sejauh ini, 90-100 juta warga Indonesia masih belum terjangkau meskipun telah dilakukan reformasi di bidang kesehatan. Indonesia juga tidak mampu mengurangi biaya *out-of-pocket* (biaya yang dikeluarkan dari kantong sendiri) untuk layanan kesehatan, yaitu bentuk pembiayaan layanan kesehatan yang paling regresif. Biaya *out-of-pocket* mencapai 47 persen dari total belanja kesehatan di Indonesia[197], yang berada pada tingkat yang sama seperti 20 tahun yang lalu. [198] Masalah utama untuk kemajuan skema JKN adalah premi jaminan kesehatan, yang masih harus dibayar pekerja informal jika ingin mendapatkan manfaat JKN. [199] Berdasarkan pengalaman dari Indonesia dan negara lain, seperti Ghana dan Tanzania terbukti bahwa memberlakukan premi asuransi bagi masyarakat miskin dan mereka yang bekerja di sektor informal menimbulkan sejumlah masalah. Pertama, premi tidak terjangkan dan/atau tidak bias diprioritaskan untuk sebagian besar perkerja informal yang hidup dengan pendapatan kecil. Ini menyebabkan sehingga banyak yang membutuhkan layanan kesehataan dan perlindungan keuangaan tapi tidak dapat menjangkau asuransi Pengeluaran pemerintah dalam hal kesehatan menjadi lebih tidak setara dengan subsidi yang condong lebih melindungi orang-orang yang mempunyai jaminan pendapatan untuk mengikuti program ini. Kedua, biaya administrasi yang tinggi untuk mengumpulkan premi dari pekerja informal. Ketiga, dana yang terkumpul tidak cukup untuk membiayai penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan premi berarti menurunkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang tidak mampu membayarnya. Indonesia harus menghindari sistem kesehatan dengan dua jenjang, di mana peserta dapat mengakses layanan kesehatan, sementara sisanya–biasanya mayoritas kelompok miskin atau pekerja sektor informal–dipinggirkan dan harus membayar biaya *out-of-pocket* yang semakin tinggi. Situasi ini akan semakin mengakar dengan berlalunya waktu karena pekerja sektor formal akan berusaha untuk mempertahankan akses mereka terhadap layanan kesehatan yang diharapkan semakin membaik.[200]

Boks 6: Hidup Lebih Mudah dengan Kartu Jakarta Sehat [201]

Ismayati, seorang warga Jakarta, meyakini bahwa KJS telah memudahkannya untuk mengakses layanan kesehatan

Kartu Jakarta Sehat (KJS) secara resmi diluncurkan pada 10 November 2012 oleh Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Program ini bertujuan memberikan jaminan kesehatan bagi warga DKI Jakarta, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu, melalui sistem rujukan berjenjang.

Empat tahun telah berlalu, sejumlah warga, terutama yang hidup dengan pendapatan kecil dan tidak menentu, telah banyak menikmati manfaat dari program kesehatan tersebut. Ismayati, misalnya, percaya bahwa KJS telah membuat segalanya lebih mudah baginya dalam mengakses layanan kesehatan.“Biasanya kita harus membayar Rp 15.000 untuk biaya administrasi ketika datang ke puskesmas, tapi sekarang tidak lagi. Uang tadi sekarang dapat digunakan untuk kebutuhan lain,” ujar Ismayati.

Ismayati telah menjadi pemengang kartu KJS sejak tahu 2014. Dia mendapatkan obat secara gratisdan menganggap KJS sebagai program yang berhasil dilaksanakan dengan baik. “Tes darah, dan bahkan tes untuk kadar kolesterol dan gula bebas biaya,” tambahnya.

Setiap anggota dalam keluarga Ismayati yang terdiri dari lima orang – Fadli dan Rifqi (anak), Imron (suami) dan Munaroh (ibu) – mempunyai kartu KJS. Dia mengatakan bahwa keluarganya sekarang tidak lagi ragu-ragu untuk mendatangi puskesmas atau rumah sakit karena proses KJS begitu mudah dan cepat. Munaroh berusia hampir 70 tahun. Dia sekarang sering pergi ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan menjalani pengobatan, termasuktes kolesterol dan gula darah.

Berdasarkan survei akhir tahun 2015 dari pemerintah DKI Jakarta yang dilakukan oleh Populi Center, KJS dipandang sebagai program pemerintah provinsi yang paling bermanfaat bagi warga Jakarta.

JKN telah sukses diluncurkan dan kini menjadi sistem kesehatan dengan pembayar tunggal terbesar di dunia.

Tidak ada negara yang pernah mencapai jaminan kesehatan universal (UHC) tanpa peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan agar dapat mencakup semua pihak yang tidak mampu memberikan kontribusi langsung. Daripada mempertanyakan bagaimana agar pekerja non-formal dapat membayar premi, pemerintah seharusnya mengakui kontribusi besar yang sudah diberikan para pekerja non-formal untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta berbagai pembayaran pajak secara tidak langsung dan informal yang telah mereka lakukan setiap hari. Premi harus dihapus untuk melindungi kesehatan para pelaku ekonomi yang penting ini, dan janji Presiden atas tersedianya

layanan kesehatan gratis secara universal harus dibiayai sepenuhnya melalui peningkatan belanja umum pemerintah. Prioritas harus diberikan kepada layanan kesehatan primer yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kelompok mayoritas, meningkatkan layanan kesehatan preventif, dan mempertahankan biaya pada tingkat yang rendah. Hal ini dapat tercapai namun tergantung pada prioritas politik.

Analisis aktuaria menunjukkan bahwa meningkatkan upaya untuk mencapai jaminan kesehatan universal untuk paket yang komprehensif, tanpa pembebanan biaya premi bagi para pekerja non-formal, akan memiliki konsekuensi bahwa pemerintah akan menghabiskan biaya sebesar 2,2 persen dari PDB.[202] Hal ini berarti melakukan peningkatan pengeluaran lebih dari dua kali lipat yang saat ini masih sangat rendah yaitu hanya 1 persen dari PDB. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dari investasi yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala mendesak dari sisi suplai di Indonesia yang semakin memperburuk ketimpangan, termasuk sangat berkurangnya tenaga kesehatan, perlengkapan dan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu Indonesia harus berupaya untuk mencapai target interim sebesar 3 persen dari PDB untuk pengeluaran kesehatan, agar menyamai belanja kesehatan dari negara Thailand yang secara regional berada pada posisi teratas dalam hal jaminan kesehatan universal (UHC). Dalam jangka panjang, dan seiring dengan kemampuan Indonesia untuk menikmati semakin besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh dari investasi pada UHC sebagaimana dialami negara-negara lain,[203] pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan belanja kesehatan sebesar 5-6 persen dari PDB sejalan dengan rekomendasi dari WHO.

Meningkatkan Belanja Pendidikan dan Memastikan Adanya Akses yang Setara

Lebih dari 50 persen dari anak Indonesia usia lima belas tahun tidak menguasai keterampilan dasar dalam membaca atau menghitung.

Meskipun anggaran pendidikan mengalami peningkatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, dana yang ada masih kurang mencukupi untuk memastikan agar semua warga Indonesia dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA, *Programme for International Student Assessment*) tahun 2012 menunjukkan bahwa prestasi pelajar Indonesia tertinggal tiga tahun ke belakang dari rata-rata OECD. Lebih dari 50 persen dari anak Indonesia usia lima belas tahun tidak menguasai keterampilan dasar dalam membaca atau menghitung. [204] Hal ini berbeda dengan Vietnam, yang berada pada posisi ke 12 dalam tes PISA 2015. Meskipun penilaian PISA lebih fokus pada keterampilan 'keras' daripada keterampilan 'lunak', yang juga penting untuk pendidikan yang berkualitas, dan tidak begitu sensitif terhadap kebutuhan lokal, penilaian ini memberikan indikasi tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian INFID menunjukkan bahwa prestasi siswa masih rendah dalam pemecahan masalah, serta kurang kreatif dan inovatif. [205] Indonesia tertinggal dalam mencapai target UNESCO sebesar 4-6 persen dari PDB untuk pendidikan.[206] Dalam jangka pendek, pemerintah harus memobilisasi penerimaan pajak untuk meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 0,6 persen dari PDB agar tercapai target 4 persen. Dalam jangka panjang, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pengeluaran menjadi 6 persen dari PDB, untuk memastikan negara memiliki sistem pendidikan dengan pendanaan penuh. Pendanaan publik sangat penting dalam menginvestasikan dan memperbaiki kualitas sekolah, memastikan bahwa biaya sekolah dan hambatan keuangan lainnya tidak mengesampingkan anak-anak, dan bahwa kelompok-kelompok marjinal ikut terjangkau dengan adanya dana tambahan.

Pendanaan juga harus digunakan untuk memperpanjang masa wajib belajar menjadi 12 tahun pendidikan yang bebas biaya untuk memperluas akses pendidikan sampai ke tingkat menengah atas, dan memastikan bahwa Indonesia mencapai Tujuan 4 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.[207] Sekitar 1,9 juta remaja di Indonesia putus sekolah pada usia SMP dan 4 juta anak muda putus sekolah pada usia SMA, sehingga total remaja usia sekolah menengah yang putus sekolah mencapai 5,9 juta anak. Angka ini merupakan salah satu angka yang tertinggi di dunia[208]. Memperpanjang masa wajib belajar akan meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah atas, mengurangi ketimpangan dalam akses dan mengurangi angka putus sekolah. Hal ini secara signifikan akan mempercepat pencapaian menuju sumber daya manusia yang semakin berkualitas di Indonesia agar lebih mampu bersaing di tingkat regional.

Di Indonesia, 5.9 juta remaja seumur siswa sekolah menengah putus sekolah

Pemerintah juga harus melakukan upaya bersama untuk mengatasi ketimpangan terhadap akses pendidikan. Angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahap transisi antara tingkatan sekolah, dan paling berdampak pada golongan termiskin. Antara pendidikan SD dan SMP, tingkat partisipasi sekolah turun 5 persen untuk kuintil terkaya, tetapi sebesar 17 persen untuk kuintil termiskin.[209] Demikian juga, dari pendidikan SMP ke SMA, angka partisipasi sekolah untuk kuintil terkaya turun dari 89 persen menjadi 70 persen, sedangkan untuk kuintil termiskin turun dari 59 persen menjadi 33 persen - tiga kali lebih banyak.[210] Akses terhadap pendidikan juga merupakan masalah gender - hanya 39,9 persen dari kaum perempuan yang menyelesaikan setidaknya pendidikan menengah, dibanding 49,2 persen dari laki-laki.[211] Selanjutnya, 70 persen dari anak muda penyandang cacat tidak memiliki akses terhadap pendidikan.[212] Ketika mengumumkan rencananya untuk mengatasi masalah ketimpangan pada tahun 2017, Presiden menekankan pada upaya untuk meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan. Pemerintah harus mengkaji bersama dengan para guru dan masyarakat, untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih menghalangi siswa miskin, perempuan, dan anak muda yang cacat, dalam mengakses pendidikan menengah, serta meluncurkan rencana tiga tahun agar segera mengatasi berbagai hambatan ini untuk mencapai penyelesaian pendidikan menengah secara universal sejalan dengan SDGs.

Menyediakan Lebih Banyak Pelatihan Kejuruan Bermutu Tinggi

Pekerja domestik (pembantu rumah tangga) dapat memperoleh akses ke pendidikan, pelatihan dan kesempatan yang lebih baik untuk karir mereka melalui Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga. Foto: Andi Cipta Asmawaty/Oxfam

Dengan dua juta penduduk Indonesia yang memasuki pasar kerja setiap tahun,[213] ada kebutuhan yang mendesak untuk memberikan pada mereka keterampilan yang diperlukan agar dapat bersaing di pasar kerja, serta mengembangkan tenaga kerja yang profesional dan terampil agar Indonesia menjadi perekonomian yang kompetitif serta berbasis keterampilan dan pengetahuan. Komitmen Presiden Jokowi baru-baru ini untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan patut dihargai. [214] Baru-baru ini pemerintah mengumumkan paket 'Kebijakan Ekonomi Berkeadilan' yang menguraikan bahwa Kementerian Perindustrian akan mendukung pendidikan kejuruan, pelatihan berbasis kompetensi, program magang dan mendorong orang untuk memperoleh sertifikat profesi yang mereka pilih. Jika berhasil melaksanakan ini, Indonesia akan mengikuti negara-negara seperti Jepang dan Jerman yang berhasil berinvestasi dalam pelatihan kejuruan dan telah berhasil menjaga tingkat pengangguran kaum muda yang cukup rendah dan memungkinkan mobilitas di pasar tenaga kerja. [215]

Anggaran yang memadai harus tersedia untuk membiayai pusat pelatihan kejuruan dan kursus keterampilan serta mendukung program magang, untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja kelas dunia dengan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Pemerintah harus meningkatkan penggunaan pajak sebagai sumber pembiayaan untuk memastikan bahwa 10-20 persen dari anggaran pendidikan dipakai untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan, tanpa mengurangi kualitas, efektivitas dan akses terhadap pelatihan kerja dan pendidikan formal. Program pelatihan kerja harus dikembangkan dan dilakukan dengan bekerjasama di antara berbagai kementerian - seperti Tenaga Kerja, Kelautan dan Perikanan, Pembangunan Desa, Transportasi, Industri dan kementerian Pertanian - dan pihak industri untuk memastikan keterampilan kerja yang relevan. Pusat pelatihan kerja di daerah harus berperan dalam memastikan bahwa keterampilan pekerja sesuai dengan permintaan lokal, tetapi mereka perlu dibekali dengan pendanaan yang memadai dan dapat menyesuaikan kurikulum pelatihan mereka untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Memperluas program pelatihan kerja di luar sistem formal (sekolah kejuruan) merupakan langkah penting lainnya yang perlu dilakukan Indonesia. Meningkatkan akses terhadap pelatihan *on-the-job* dan magang berbayar, serta memfasilitasi penciptaan lapangan kerja baru, seperti usaha *start-up*, adalah bentuk-bentuk inisiatif yang penting. Perusahaan seharusnya diwajibkan untuk menyediakan kesempatan pelatihan, seperti pelatihan *on-the-job*, magang berbayar dan penempatan kerja, dengan sertifikasi profesional dan adanya pengakuan. Perusahaan harus berkomitmen untuk menawarkan lebih banyak peluang pelatihan bagi karyawan yang ada dan calon karyawan di masa depan, dan menyadari bahwa berinvestasi dalam pengembangan keterampilan karyawan akan memungkinkan usaha mereka untuk bergerak lebih maju di atas rantai nilai. Selain itu, dunia usaha harus mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas program pelatihan lokal dengan menyediakan tambahan pengajar dan instruktur untuk program pelatihan kerja.

Peningkatan kapasitas juga harus diberikan kepada para pekerja (terutama perempuan) di sektor pertanian agar mereka dapat menerapkan praktik-praktik pertanian yang baik sehingga meningkatkan hasil tanaman, mengurangi kerugian pasca-panen dan mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, harus ada peningkatan upaya untuk memberdayakan perempuan di daerah pedesaan agar dapat naik ke atas rantai nilai, serta ikut terlibat dalam proses pengolahan dan pemasaran. Mereka harus diberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan mereka, bersamaan dengan akses terhadap kredit dan pasar.

Anggaran yang semakin besar untuk pelatihan kejuruan juga harus memiliki mekanisme yang mendorong pemerataan untuk memastikan bahwa mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi terendah, kaum perempuan dan anak perempuan, dapat mengakses pelatihan kejuruan yang berkualitas. Sebuah studi pada tahun 2012 menemukan bahwa dari 22 negara dimana pendidikan kejuruan merupakan bagian utama dari pendidikan pada usia 15, Indonesia adalah salah satu negara dengan proporsi siswa SMK terendah dari kelompok sosial-ekonomi paling bawah.[216] Memastikan akses yang merata terhadap pelatihan kejuruan akan membantu untuk mengurangi ketimpangan pasar tenaga kerja, karena akan memberikan semua kelompok masyarakat kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka, dan mengakses pekerjaan berketerampilan tinggi dengan upah yang lebih tinggi. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk memperluas program dukungan yang ada dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang rendah dapat mengakses pendidikan formal, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) [217], bagi mereka yang ingin mengakses pelatihan kejuruan.

Boks 7: Program Kerja Oxfam untuk Pemberdayaan Pemuda

Pengangguran di kalangan generasi muda merupakan masalah besar di Indonesia, yang memiliki tingkat pengangguran kaum muda tertinggi di ASEAN (lebih dari 20 persen)[218]. Oxfam di Indonesia telah merintis program baru untuk memberdayakan kaum muda agar dapat bekerja (*Empower Youth for Work*). Program ini mencakup tiga provinsi: Jawa Barat (Indramayu); Sulawesi Selatan (Barru, Maros dan Pangkep); serta Sulawesi Tenggara (Buton dan Bau-Bau), yang diperkirakan akan mencapai lebih dari 48.000 penerima manfaat langsung (pemuda berusia 14 hingga 24 tahun, yang 70 persen di antaranya adalah kaum perempuan dan anak perempuan). Program ini akan difokuskan pada pemuda yang memiliki kesempatan terbatas untuk mengembangkan keterampilan hidup mereka dan keterampilan formal yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan formal atau mengembangkan usaha mikro. Banyak di antara perempuan yang ditargetkan terbatasi oleh kurangnya hak kesehatan seksual dan reproduksi serta kendali yang terbatas atas waktu mereka sendiri.

Oxfam akan bekerja sama dengan mitra kerja untuk melakukan serangkaian kegiatan, dengan melibatkan sektor swasta dan pemerintah. Kegiatan yang dimaksud antara lain: bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lain untuk menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pelatihan teknik dan keterampilan lunak (*soft skill*) yang ada; mendorong sektor swasta untuk menyediakan lebih banyak pelatihan *on-the-job*; dan menyiapkan pusat kegiatan setempat *(local hub)* agar kaum muda memiliki ruang untuk meningkatkan keterampilan mereka dan membangun jaringan dukungan yang dapat membantu mereka mencari pekerjaan. Program ini juga akan bekerja sama dengan -perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan upah dan memperbaiki kondisi kerja serta mempekerjakan lebih banyak pemuda, terutama kaum perempuan. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kaum muda, terutama kaum perempuan, agar mereka dapat menggunakan hak ekonomi, sosial dan kesehatan reproduksi mereka dengan memperjuangkan berbagai kebijakan dan mendorong perubahan norma sosial yang menyisihkan pemuda dari upaya pemberdayaan ekonomi dan melanggengkan ketidaksetaraan gender.

Elemen yang penting bagi program ini adalah Dewan Penasehat Pemuda, dengan perwakilan yang diambil dari tiap-tiap provinsi yang tercakup dalam program ini, dan akan mengadakan pertemuan dua kali dalam setahun sebagai sarana untuk menyumbang ide-ide untuk kegiatan yang akan dilakukan, memikirkan tentang bagaimana melibatkan kaum muda dalam program ini, memberikan umpan balik tentang kegiatan yang direncanakan, serta memantau dan mengevaluasi rencana.

4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah dapat mengambil berbagai langkah yang jelas untuk mengakhiri ketimpangan yang ekstrem di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia menganggap sebagai hal yang penting agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok lainnya. Presiden Jokowi sepakat dengan hal ini, dan pemerintah telah memberi prioritas pada upaya penganggulangan ketimpangan untuk tahun 2017. Pemerintah harus melangkah lebih jauh lagi dari berbagai tindakan positif yang telah dilakukan, untuk memastikan kerja dan upah yang adil untuk semua, dan menbangun sistem pajak progresif yang dapat menghasilkan pendapatan yang memadai untuk melakukan investasi pada layanan kesehatan dan pendidikan. Berbagai indikasi akhir-akhir ini yang menunjukkan adanya sedikit penurunan tingkat ketimpangan patut dihargai, namun belum jelas apakah kemajuan ini akan dapat bertahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Jokowi sendiri, ketimpangan di Indonesia telah mencapai tingkat yang 'membahayakan', tetapi dengan mengambil tindakan berikut saat ini juga akan membantu untuk mengurangi ketimpangan yang semakin parah, dan memastikan agar tren ketimpangan baru-baru ini dapat dipertahankan. Hal ini akan mengurangi kemiskinan, menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membangun kohesi social, dan memastikan bahwa Indonesia memenuhi target SDG-nya. Mengambil tindakan sekarang juga adalah satu-satunya cara untuk memastikan masa depan yang sejahtera bagi Indonesia.

Untuk menghapus ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok lainnya, pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut ini:

Ketimpangan

- Menyusun rencana nasional yang menunjukkan dengan jelas bagaimana pemerintah dapat memenuhi target penurunan koefisien Gini yang telah ditetapkan Presiden. Rencana ini harus menjabarkan bagaimana ketimpangan regional, termasuk antara urban dan pedesaan, Indonesia timur dan barat, dapat ditanggulangi.
- Memastikan bahwa pemerintah daerah juga mendukung upaya untuk mengurangi ketimpangan dengan mencantumkan upaya pengurangan ketimpangan ke dalam rencana pembangunannya.

Pekerjaan dan upah yang adil

- Menyusun peta jalan *(roadmap)* untuk meningkatkan tingkat upah minimum hingga mencapai upah hidup layak dengan melibatkan serikat buruh, dan memastikan bahwa upah minimum tersebut dapat diberlakukan. Menjajaki lebih lanjut ide penetapan upah hidup layak di semua negara anggota ASEAN.

- Melakukan pengaturan jaminan kerja:

    - Mencegah badan usaha dari praktek kerja diskriminatif dan dari upaya untuk lebih banyak mempekerjakan pekerja *outsourcing*, pekerja sementara atau pekerja dengan kontrak kerja yang tidak pasti.

    - Mensyaratkan transparansi dalam mengungkapkan proporsi pekerja dengan perjanjian kerja permanen yang pasti.

- Mengharuskan badan usaha untuk memastikan bahwa semua pekerja dapat menggunakan hak-hak mereka, terutama kebebasan berserikat dan yang terkait dengan kesepakatan kerja bersama. Memastikan adanya mekanisme verifikasi independen yang dapat diandalkan terhadap pihak pemberi kerja, jika pekerja yang paling rentan mempercayai dan menggunakannya.

- Menghapus ketimpangan upah antar gender dan menghilangkan hambatan terhadap partisipasi kaum perempuan yang setara dalam angkatan kerja, termasuk bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk mendorong norma-norma sosial dan sikap positif yang terkait dengan pekerjaan perempuan.

- Menyediakan lebih banyak pelatihan kejuruan yang berkualitas dengan: meningkatkan penggunaan pajak sebagai sumber pembiayaan untuk mengalokasikan 10-20 persen dari anggaran pendidikan bagi pelatihan kejuruan; menghapus persyaratan pendidikan minimal SMA untuk dapat mengikuti pelatihan dari BLK; memastikan kerjasama lintas-kementerian dan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan program pelatihan; mewajibkan perusahaan untuk menyediakan pelatihan *on-the-job*; dan melaksanakan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa kelompok dari kalangan termiskin, kaum perempuan dan anak perempuan dapat mengakses pelatihan kejuruan.

Pajak

- Meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 21,5 persen agar memenuhi potensi pajak sepenuhnya di Indonesia dan meningkatkan penerimaan untuk mendanai layanan publik yang vital.
- Mereformasi sistem pajak penghasilan perseorangan. Dalam jangka pendek, pemerintah harus menambahkan tarif pajak sebesar 45 persen untuk memastikan bahwa mereka yang ‘super-kaya’, yang didefinisikan sebagai mereka yang berpenghasilan lebih dari Rp 10 miliar, membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam jangka panjang, pemerintah harus melakukan peninjauan atas sistem pajak penghasilan perseorangan, dengan tujuan menambahkan tarif pajak bagi mereka yang berada di atas, pada tingkat yang lebih tinggi.
- Mengkaji perpajakan harta kekayaan, yang bertujuan meningkatkan pajak bumi dan bangunan untuk properti bernilai tertinggi, meningkatkan tarif pajak harta warisan, dan memperkenalkan pajak kekayaan bersih untuk mengatasi masalah ketimpangan.

- Memastikan agar semua wajib pajak membayar bagian pajaknya secara adil dengan mengembangkan rencana aksi nasional untuk memerangi penghindaran pajak dan penggelapan pajak, serta membentuk sebuah gugus tugas baru tentang perusahaan multinasional dan golongan ultra kaya untuk mengekang aliran uang yang ilegal.

- Menghindari keterlibatan dalam upaya persaingan *race to the bottom* bagi pajak penghasilan badan usaha yang dilakukan dengan menurunkan tarif pajak penghasilan badan usaha. Menghentikan upaya penawaran insentif pajak diskresioner, serta mensyaratkan penilaian ekonomi dan risiko yang ketat untuk setiap insentif pajak baru (termasuk kontribusinya terhadap fenomena *race to the bottom* di tingkat global dan regional). Semua insentif harus ditinjau ulang secara berkala untuk membatasi keuntungan pribadi dan timbulnya kerugian masyarakat secara jangka panjang, dan setiap pengecualian pajak harus dihapus apabila tidak ada bukti yang jelas tentang keefektifannya.

- Bekerja di tingkat regional untuk menjalin kerjasama perpajakan dengan negara ASEAN lainnya, termasuk: memastikan bahwa semua negara di ASEAN mengikuti langkahnya dan mematuhi standar pelaporan umum (CRS) untuk pertukaran informasi otomatis (AIE); mengembangkan rencana aksi regional untuk mengatasi masalah penghindaran pajak; dan mendorong reformasi pajak internasional untuk generasi kedua yang melampaui BEPS, yang akan dilakukan oleh Badan Perpajakan Dunia di bawah PBB.

Belanja publik

- Melanjutkan berbagai langkah maju menuju jaminan kesehatan universal (UHC) melalui program JKN, meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan dengan menghapus semua premi untuk layanan kesehatan dan beralih ke sistem kesehatan nasional yang sepenuhnya didanai pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan melipatkan gandakan belanja kesehatan hingga setidaknya 2,2 persen dari PDB. Berupaya untuk meningkatkan angka pengeluaran belanja ini hingga setidaknya 3 persen PDB untuk kesehatan pada tahun-tahun mendatang agar segera mengatasi kendala dari sisi suplai, khususnya tenaga kesehatan, dan memprioritaskan layanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan biaya pada tingkat rendah.

- Meningkatkan pengeluaran pendidikan menjadi sebesar 4 persen dari PDB dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang mencapai rekomendasi UNESCO sebesar 6 persen dari PDB. Menggunakan pembelanjaan yang semakin besar untuk memperpanjang panjang masa wajib belajar menjadi12 tahun pendidikan gratis dan memperluas akses pendidikan hingga tingkat menengah atas.

- Mengkaji bersama dengan para guru dan masyarakat, untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih menghalangi siswa miskin, perempuan, dan anak muda yang cacat, dalam mengakses pendidikan menengah, dan meluncurkan rencana tiga tahun agar segera mengatasi berbagai hambatan ini untuk mencapai penyelesaian pendidikan menengah secara universal yang sejalan dengan SDGs.

- Menyediakan pelatihan kejuruan yang lebih banyak dan berkualitas lebih tinggi, dengan lebih banyak menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan untuk mengalokasikan 10-20 persen dari anggaran pendidikan bagi pelatihan kejuruan - tanpa mengurangi kualitas sistem pendidikan formal - memastikan kerjasama lintas kementerian dan bermitra dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan program pelatihan; mewajibkan perusahaan untuk memberikan pelatihan *on-the-job*; serta melaksanakan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa masyarakat paling miskin, perempuan dan anak perempuan, dapat mengakses pelatihan kejuruan.

Gender

- Menganalisis secara sistematis usulan kebijakan yang terkait dengan dampaknya terhadap kaum perempuan dan anak perempuan. Memperluas proses penganggaran berbasis gender yang ada dan memberikan dukungan terhadap organisasi perempuan agar ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan penganggaran belanja publik, dan untuk memastikan adanya partisipasi masyarakat sipil.

- Memegang komitmen terhadap berbagai inisiatif yang mengurangi ketidaksetaraan gender di masyarakat termasuk dalam menyikapi norma-norma sosial yang merugikan, mendukung kepemimpinan perempuan dan wewenang untuk mengambil keputusan, serta mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
- Mengubah UU Perkawinan untuk meningkatkan batas usia minimum menikah dari 16 menjadi 18 tahun, dan menghapus poin 3 dari pasal 31 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Sektor swasta perlu memainkan peran aktifnya dalam mengurangi ketimpangan, dan mengambil berbagai langkah berikut ini.

- Menerbitkan data ketimpangan upah antar gender di perusahaannya.
- Memastikan akses terhadap peluang kerja yang layak dan aman bagi kaum perempuan serta tidak ada perlakuan diskriminatif di tempat kerja, memajukan hak perempuan untuk berorganisasi dan memainkan peran aktif di serikat pekerja.
- Mempekerjakan pihak pekerja dengan perjanjian kerja yang memberikan jaminan kerja.
- Mendukung langkah-langkah pemerintah menuju upah hidup layak nasional dan menerapkan berbagai kebijakan yang mengarah pada upah hidup layak dalam bisnis mereka.
- Melakukan investasi dalam keterampilan pekerja untuk memenuhi kebutuhan atas karyawan yang berketerampilan tinggi, sehingga memungkinkan usaha untuk bergerak naik ke atas rantai nilai, dan meningkatkan upah bagi para pekerjanya.
- Menyediakan pelatihan *on-the-job*, program magang berbayar dan penempatan kerja, dengan sertifikasi profesional dan adanya pengakuan.
- Melibatkan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa BLK menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

CATATAN AKHIR

1 Pengukuran gini berdasarkan data konsumsi. World Bank (2015).' Indonesia's Rising Divide', hal.8. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide
2 Lihat catatan no. 22 untuk perhitungan
3 http://www.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth-annual
4 United Nations Development Programme (2015). Human Development Report 2015. Work for Human Development. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf, Indeks Pembangunan Manuasia Indonesia adalah 0.684 di tahun 2014 (hal 21). PMI Asia Timur dan Pasifik adalah 0.710 di tahun yang sama (hal 211).
5 World Bank (2016) GDP Growth Indonesia http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=ID&start=2000
6 World Bank (2014) Data Povcal http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IDN
7 Berbagai pengukuran dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan. Indeks gini merupakan yang paling umum digunakan dan melihat perbedaan dibandingkan dengan kesetaraan yang sempurna. Namun demikian, kadang pengukuran ini gagal untuk menunjukkan perbedaan antara kelompok atas dan bawah dari distribusi karena ia sangat dipengaruhi oleh perubahan kecil di kelompok menengah. Ratio Palma adalah yang justru melihat perbedaan antara 10 persen teratas dari populasi dan 40 persen terendah, sehingga dapat lebih baik menunjukkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Baik koefisien Gini dan ratio Palma menggunakan konsumsi (sebuah ukuran yang menunjukkan berapa besar pengeluaran keluarga untuk pangan, non pangan dan jasa) sebagai proxy pendapatan. Namun, data konsumsi sebenarnya merupakan proxy yang kurang tepat untuk menggambarkan skala yang sesungguhnya dari ketimpangan pendapatan, karena orang-orang di kelompok teratas biasanya menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Oleh karena itu, koefisien gini kemungkinan besar tidak betul-betul mencerminkan skala ketimpangan di Indonesia yang sesungguhnya. -
8 Pengukuran gini berdasarkan data konsumsi. World Bank (2015). Indonesia's Rising Divide, hal8. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide
9 A.A. Yusuf (n.d). Kesejahteraan untuk Semua? Meninjau Tren berbagai Dimensi Ketimpangan di Indonesia hal.9 (kalkulasi penulis berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)). Center for Economics and Development Studies (CEDS). http://csnbricsam.org/wp-content/uploads/2013/08/Buku-Riset-Ketimpangan-Pak-Arief-Ok-1.pdf
10 Ibid.
11 World Bank (2014) *Data Povcal* http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IDN
12 Global Indonesian Voices (2016) Indonesia has the Fastest Urbanisation Growth in Asia http://www.globalindonesianvoices.com/27678/indonesia-has-the-fastest-urbanization-growth-in-asia/
13 Indonesia Investments (2016). GINI Ratio Indonesia Declines: Economic Inequality Narrows. http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/gini-ratio-indonesia-declines-economic-inequality-narrows/item7113; A. Amindoni (2016). Indonesia's Inequality Narrows to 0.39 in March. The Jakarta Post. http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/19/indonesias-inequality-narrows-to-0-39-in-march.html
14 Ibid.
15 Jakarta Post Newsdesk (2017) Gini Ratio Slightly Down in September: Central Statistics Agency http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/03/gini-ratio-slightly-down-in-september-central-statistics-agency.html
16 Oxfam (2017) An Economy for the 99% https://www.oxfam.org/en/research/economy-99
17 Credit Suisse. (2016) Global Wealth Report 2016. https://www.credit-suisse.com/uk/en/about-us/research/research-institute/global-wealth-report.html
18 Credit Suisse. (2016) Global Wealth Databook 2016. https://www.credit-suisse.com/uk/en/about-us/research/research-institute/global-wealth-report.html
19 Forbes. (2016). The World's Billionaires. http://www.forbes.com/billionaires/list/
Credit Suisse. (2016) Global Wealth Databook. https://www.credit-suisse.com/uk/en/about-us/research/research-institute/global-wealth-report.html
20 Ibid.
21 Orang terkaya Indonesia memiliki kekayaan bersih senilai $8.1 milyar di tahun 2016 (Forbes Billionaires database 2016). Penghitungan tidak mengikutsertakan bunga atas kekayaan.
22 Pendapatan yang dihasilkan kekayaan orang terkaya Indonesia diperkirakan dengan menerapkan tingkat bunga tahunan sebesar 4%. Tingkat ini sesuai dengna tingkat pertumbuhan kekayaan dari HNWI (high net worth individuals) di tahun 2015, dan oleh karenanya dijadikan proxy tingkat rata-rata pendapatan atas kekayaan untuk tahun tersebut. - (CapGemini's 2016 World Wealth Report, https://www.uk.capgemini.com/experts/thought-leadership/world-wealth-report-2016). Povcal data (http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx) menunjukkan bahwa konsumsi tahunan rata-rata 10% orang termiskin di Indonesia adalah $49.99. Pendapatan harian dari kekayaan orang terkaya Indonesia sebesar 1,480 kali lipat dari konsumsi tahunan dari 10% orang Indonesia termiskin.

23 Pengentasan kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai keadaan dimana tidak ada lagi orang yang hidup di bawah $1,90 garis kemiskinan ekstrem. Kalkulasi menggunakan data Povcal Bank Dunia yag terbaru. (2014, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx). Indonesia memiliki insiden kemiskinan ekstrem sebesar 8.25% di tahun 2014, yang berarti bahwa dengan populasi sebesar 254.45 juta, 20,992,125 orang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Nilai absolute dari angka kesenjangan kemiskinan per orang dihitung dengan cara mengkalikan angka kesenjangan kemiskinan (rata-rata persentase orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem $1.90) sebesar 1.25% dengan S1.90, yang menghasilkan angka $0.02375. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem kemudian dihitung dengan mengkalikan jumlah orang Indonesia yang berada di kelompok miskin ekstrem dengan nilai kesenjangan kemiskinan dikali 365 hari, sehingga menghasilkan angka $181,975,483.6. Perkalian pendapatan harian dari kekayaan orang terkaya Indonesia memberikan hasil tahunan sebesar $324,000,000 . Angka ini akan lebih rendah dari yang sesungguhnya karena tidak memperhitungkan efek kumulatif dari bunga.
24 Oxfam (2016). An Economy for the 1%: How privilege and power in the economy drive extreme inequality and how this can be stopped. http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-the-economy-drive-extreme-inequ-592643
25 World Economic Forum (2016). Indonesia: Gender Gap Index 2016. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=IDN
26 World Bank (2014) Povcal Data http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IDN
27 World Bank (2015). A Perceived Divide: How Indonesians Perceive Inequality and What They Want Done About It. http://documents.worldbank.org/curated/en/310491467987873894/pdf/101664-WP-PUBLIC-Box394818B-Background-Paper-A-Perceived-Divide.pdf
28 Bloomberg (2015). 'Dangerous' Inequality Spurs Widodo's Indonesia Shakeup. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-02/-dangerous-inequality-spurs-widodo-drive-for-indonesia-shakeup
29 J. Lu (2017) Indonesia resolves to tackle inequality in 2017 http://www.humanosphere.org/basics/2017/01/indonesia-resolves-tackle-inequality-2017/
30 World Bank (2014) Povcal Data http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IDN
31 Asian Development Bank (2015). Summary of Indonesia's Poverty Analysis. http://www.adb.org/sites/default/files/publication/177017/ino-paper-04-2015.pdf
32 World Bank (2014) Povcal Data http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IDN
33 P. Aji (2015) Summary of Indonesia's Poverty Analysis. Asia Development Bank papers on Indonesia https://www.adb.org/sites/default/files/publication/177017/ino-paper-04-2015.pdf
34 Ibid.
35 World Bank (2014) Povcal Data http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IDN
36 World Bank (2015). Indonesia's Rising Divide, op. cit., hal.24.
37 Ibid.
38 Oxfam (2014). Even It Up: Time to End Extreme Inequality. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-291014-en.pdf
39 Ibid., hal.37. Untuk proyeksi PDB per kapita, penulis menggunakan IMF World Economic Outlook data dollaryang berlaku-PPP -untuk April 2014, yang disesuaikan dengan US inflasi CPI di tahun 2010–11.
40 IMF (2014). Redistribution, Inequality and Growth. http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf
41 J. Smialek (2015). Reducing Income Inequality Boosts Growth, IMF Study Finds. Bloomberg. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-15/imf-study-finds-reducing-income-inequality-gives-boost-to-growth
42 World Bank (2015). Indonesia: Rising Inequality Risks Long-Term Growth Slowdown. http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/12/08/rising-inequality-risks-long-term-growth-slowdown
43 SMERU Research Institute (2015). Estimating the Impact of Inequality on Growth and Unemployment in Indonesia. http://smeru.or.id/en/content/estimating-impact-inequality-growth-and-unemployment-indonesia
44 Ibid.
45 J. Lu (2017) Indonesia resolves to tackle inequality in 2017 http://www.humanosphere.org/basics/2017/01/indonesia-resolves-tackle-inequality-2017/
46 SMERU Research Institute (2015). Inequality and instability in Democratic and Decentralised Indonesia http://www.smeru.or.id/en/content/inequality-and-stability-democratic-and-decentralized-indonesia
47 World Bank (2016). Indonesia's Rising Divide, hal.9. http://pubdocs.worldbank.org/en/162614607050881 79/Indonesias-Rising-Divide-English.pdf
48 CRISE (2005). Horizontal Inequality and Communal Violence: Evidence from Indonesian Districts. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c6ded915d3cfd0013aa/wp22.pdf
49 Oxfam (2014). Even It Up: Time to End Extreme Inequality, op. cit. hal.13

50 T. Piketty (2013). Capital in the Twenty-First Century.
51 Oxfam (2015) Oxfam Applauds World Bank's Rejection of Trickle-down Economics, and Recognition of Huge Inequality Challenge https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/oxfam-applauds-world-banks-rejection-trickle-down-economics-and-recognition-huge, E. Dabla-Norris (2015) Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf
52 K. Watkins (1998) Economic Growth with Equity. Lessons from East Asia http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/economic-growth-with-equity-lessons-from-east-asia-121035
53 Ibid. hal.86
54 Ibid, hal. 39
55 Ibid, hal.36
56 Ibid, hal.5
57 Ibid, hal.124 and hal.14
58 IMF (2003) Life with the IMF: Indonesia's Choices for the Future by Jack Boorman and Andrea Richter Hume https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp071503#P63_12084, IMF (2000) Financial Sector Crisis and Restructuring: Lessons from Asia http://www.imf.org/external/pubs/ft/op/opFinsec/
59 Global Legal Monitor (2015). Indonesia: Jakarta Court Bans Water Privatization. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-jakarta-court-bans-water-privatization/
60 P. Pacheco (2012) Oil palm in Indonesia linked to trade and investment: Implications for forests Pablo Pacheco Agriculture and rural development learning exchange http://www.cifor.org/ard/documents/results/Day2_Pablo%20Pacheco.pdf
61 Ibid.
62 Forbes. (2016). The World's Billionaires. http://www.forbes.com/billionaires/list/
63 Oxfam (2016) Working for the Few: Political Capture and Economic Inequality https://www.oxfam.org/en/research/working-few
64 Oxfam (2015). For Richer or Poorer: The capture of growth and politics in emerging economies. http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/for-richer-or-poorer-the-capture-of-growth-and-politics-in-emerging-economies-578757
65 E. Warburton (2014). The Business of Politics in Indonesia. Inside Indonesia. http://www.insideindonesia.org/the-business-of-politics-in-indonesia-4
66 J.A. Winters (2011). Who Will Tame the Oligarchs? Inside Indonesia. http://www.insideindonesia.org/who-will-tame-the-oligarchs
67 R. Borsuk (1998). Suharto Cronies Face Hard Future As They Try to Rebuild Businesses. Wall Street Journal. http://www.wsj.com/articles/SB914971949867116500
68 R.T. Deacon and A. Rode (2012) Rent Seeking and the Resource Curse http://econ.ucsb.edu/~deacon/RentSeekingResourceCurse%20Sept%2026.pdf
69 B. Milanovic (2016). Why might the rich be indifferent to income growth of their own countries? https://www.gc.cuny.edu/CUNY_GC/media/CUNY-Graduate-Center/PDF/Centers/LIS/Milanovic/papers/Econ_letters.pdf
70 Oxfam (2015). For Richer or Poorer, op. cit., hal.31, Tabel 3.
71 The Economist (2014). Planet Plutocrat: The Countries Where Politically Connected Businessmen Are Most Likely to Prosper. http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-politically-connected-businessmen-are-most-likely-prosper-planet
72 Penulis menggunakan data Forbes tahun 2014 untuk mengidentifikasi industry yang menjadi sumber kekayaan masing-masing miliarder. Industri-industri ini kemudian dikategorisasikan sebagai 'cronyism-prone' atau 'non-cronyism-prone' berdasarkan indeks kroniThe Economist.. Bila suatu industry diidentifikasi sebagai - 'non-cronyism-prone', data Forbes digunakan untuk mengidentifikasi apakah kekayaan miliarder tersebut merupakan warisan atau hasil usahanya sendiri. Asumsi yang digunakan untuk grafik ini adalah bahwa industry yang paling berkontribusi pada kekayaan seorang miliarder adalah sumber dari seluruh kekayaan mereka.
73 IMF (2015). Catalyst for Change: Empowering Women and Tackling Income Inequality. https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1520.pdf
74 Oxfam (2015). For Richer or Poorer, op. cit., hal. 39, Tabel 6
75 World Economic Forum (2016). The Global Gender Gap Index 2016: Rankings. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=IDN
76 Organisation for Economic Co-operation and Development (2014). Social Institutions & Gender Index: Indonesia. http://www.genderindex.org/country/indonesia
77 Oxfam (2015). For Richer or Poorer, op. cit., hal. 39, Tabel 6
78 AIPEG, DFAT, CDES (2015) Gender Inequality in Indonesia
79 International Labour Organization: ILOSTAT. Summary Tables. Indonesia Country Profile http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/ContryProfileId?_afrLoop=466613212410007#!%40%40%3F_afrLoop%3D466613212410007%26_adf.ctrl-state%3Dv7o0jg6yh_154

80 L. Chakraborty (2016) Asia: A Survey of Gender Budgeting Efforts. IMF Working Paper http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16150.pdf
81 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. and Lang, J. (2013). Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? Quantitative Findings from the United Nations Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women and UNV http://www.gsdrc.org/document-library/why-do-some-men-use-violence-against-women-and-how-can-we-prevent-it-quantitative-findings-from-the-united-nations-multi-country-study-on-men-and-violence-in-asia-and-the-pacific/
82 National Commission on Violence Against Women (2016), *Annual Factsheet 2016*, http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/
83 Human Rights Watch (2016), *World Report 2016*, https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/indonesia#49dda6
84 World Bank (2015) Women Business and the Law http://wbl.worldbank.org/
85 United Nations (2015). Sustainable Development Goals: 17 Goals to Transform Our World. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
86 F.S. Dundaryani (2017) Jokowi Tells Ministers to Address Socioeconomic Disparity http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/31/jokowi-tells-ministers-to-address-socioeconomic-disparity.html
87 https://www.oxfam.org/en/research/working-many
88 World Bank (2014) World Bank and Education in Indonesia http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia
89 OECD (2016). Survey of Adult Skills (PIAAC). http://www.oecd.org/skills/piaac/
90 INFID (2014). Trend of Inequality and Policy Options in Indonesia: http://infid.org/wp-content/uploads/2015/09/penelitian22.pdf
91 Oxfam (2017, forthcoming) Commitment to Reducing Inequality Index
92 UNESCO (2014) UNESCO Education Strategy 2014-2021 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf, hal.27
93 J.M.B. Stern and T.M. Smith (2016). Private Secondary Schools in Indonesia: What is driving the demand? International Journal of Educational Development 46 (2016) 1–11. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059315300055
94 World Bank (2016). Indonesia's Rising Divide, op. cit., hal.14.
95 TNP2K (The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction) *The Smart Indonesia Programme Through the Smart Indonesia Card (KIP)* http://www.tnp2k.go.id/en/frequently-asked-questions-faqs/cluster-i-2/the-smart-indonesia-programme-through-the-smart-indonesia-card-kip/
96 Ibid.
97 Dalam sistem pembayar kesehatan tunggal, instansi tunggal publik atau kuasi-publik mengambil tanggung jawab untuk pembiayaan layanan kesehatan untuk semua warga.
98 Oxfam (2017, akan terbit) Commitment to Reducing Inequality Index
99 M.V Tangka (2015) Inequality and the Education and Healthcare Privatisation Policy, in Inequality, the Dark Side of Development in Indonesia, (Oxfam and INFID, 2015), hal.97. http://csnbricsam.org/wp-content/uploads/2013/08/Indonesia-Inequality-the-Dark-Side-of-Development-in-Indonesia-including-all-policy-analyses.pdf
100 Ministry of Public Works (n.d.). Rural Road in Indonesia: Issues and Challenges. http://www.drr.go.th/sites/default/files/presentation_of_mr.max_antameng_indonesia.pdf
101 S. Abdullah (2013). Laporan Ketahanan Pangan di Nabire.
102 E. Noerdin (2014). Transport, Health Services and Budget Allocation to Address Maternal Mortality in Rural Indonesia. Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific, No 84. http://www.unescap.org/sites/default/files/Bulletin%2084_Article1.pdf
103 BPS, Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), data diolah
104 R. Cahyafitri (2014) Freeport Asked to Build Smelter in Papua, not in Gresik http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/24/freeport-asked-build-smelter-papua-not-gresik.html
105 Menurut BPS, jumlah petani kecil pada tahun 2013 mencapai 26,13 juta orang.
106 TuK Indonesia, Profundo, GAPKI (2015). 25 Raksasa Kuasai Separuh Lahan Sawit. http://katadata.co.id/infografik/2015/02/16/25-raksasa-kuasai-separuh-lahan-sawit
107 Oxfam (2016). Unearthed: Land, Power and Inequality in Latin America. https://www.oxfam.org/en/research/unearthed-land-power-and-inequality-latin-america
108 International Land Coalition (2014). Participatory Mapping of Customary Forest Use to Influence Spatial Planning. Case study: Sekadau District, Indonesia. http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/case_studies_fs_1_indonesia.pdf
109 ILO (2015). Indonesia: Trends in Wages and Productivity January 2015. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_343144.pdf
110 Ibid., hal.2.

111 Konsorsium Masyarakat Sipil (2016). Catatan Kebijakan APBN 2017 and 2018 'Pentingnya Realokasi Dana Pendidikan Umum untuk Perbaikan Ketenagakerjaan/Program Pelatihan Keterampilan".
112 World Bank (2015). Indonesia's Rising Divide, op. cit.
113 Penelitian menggunakan berbagai metode survei, wawancara dan diskusi kelompok terarah dengan pekerja di industri garmen yang memproduksi pakaian olahraga untuk pasar lokal dan eskpor.
114 ILO (2016) Indonesia: Decent Work Country Programme 2012–2015, p.13. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/genericdocument/wcms_189860.pdf
115 Di Indonesia, tingkat upah minimum ditentukan di tingkat daerah daripada tingkat nasional
116 IndustriALL (2016) Indonesia: low wages in the textile and garment industry undermine workers' rights http://www.industriall-union.org/indonesia-low-wages-in-the-textile-and-garment-industry-undermine-workers-rights
117 Berdasarkan data BPS, pada bulan Agustus 2015, 48,5 juta orang atau 42,24% dari angkatan kerja bekerja di sektor formal, sedangkan 66,3 juta atau 57,76% bekerja di sektor informal.
118 World Bank (2014). Indonesia Economic Quarterly, March 2014: Investment in Flux. World Bank Country Office for Indonesia, Jakarta. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/03/18/indonesia-economic-quarterly-march-2014
119 ADB (2009) Informal Employment in Indonesia. ADB Economics Working Paper Series https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28247/economics-wp156.pdf , p.21
120 Jakarta Globe (2017) Govt Releases Policy Package to Improve Welfare and Reduce Inequality http://jakartaglobe.id/business/govt-releases-policy-package-to-improve-welfare-and-reduce-inequality/
121 K. Salnis (2016). Jokowi Amnesty Favors Tax Cheats and Punishes Payers, OECD Says. Bloomberg. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-19/jokowi-amnesty-favors-tax-cheats-and-punishes-payers-oecd-says
122 IMF (2011). Indonesia: Selected Issues. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11310.pdf
123 H.Widhiarto. (2014) RI to Miss Annual Income Tax Target: Minister http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/20/ri-miss-annual-income-tax-target-minister.html, Indonesia Investments (2015) Tax Collection to Miss Target in 2015, Indonesia's Tax Chief Resigns http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/tax-collection-to-miss-target-in-2015-indonesia-s-tax-chief-resigns/item6247?.
124 Oxfam (2014). Even It Up: Time to End Extreme Inequality, op. cit.
125 Oxfam (forthcoming, 2017) Commitment to Reducing Inequality Index. Using most recently available authenticated data.
126 World Bank (2015). Taxes & Public Spending in Indonesia: Who Pays and Who Benefits?, p.25. http://documents.worldbank.org/curated/en/167241468196450488/pdf/101667-WP-PUBLIC-Box394818B-Background-Paper-Taxes-and-Public-Spending.pdf
127 OECD (2016). Tax on Personal Income. https://data.oecd.org/tax/tax-on-personal-income.htm
128 Peraturan Pemerintah (PP No. 48/1994).
129 Deloitte (2016) Indonesian Tax Guide 2016 https://www2.deloitte.com/id/en/pages/tax/articles/indonesian-tax-guide-2016.html
130 Indonesia Investments (2016).Corporate Income Tax Indonesia To Be Cut in 2017? http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/corporate-income-tax-indonesia-to-be-cut-in-2017/item7087
131 Indonesia Investments (2016).Corporate Income Tax Indonesia To Be Cut in 2017? http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/corporate-income-tax-indonesia-to-be-cut-in-2017/item7087
132 PwC Worldwide Tax Summaries (2016). Indonesia – Tax Credits and Incentives. http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Indonesia-Corporate-Tax-credits-and-incentives
133 Oxfam (2016). Even It UP: How to Tackle Inequality in Vietnam, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-vietnam-inequality-120117-en.pdf
134 PRAKARSA Policy Review (2015). Anticipating Tax War in the ASEAN Economic Integration Era. http://foolsgold.international/wp-content/uploads/2015/09/ASEAN-tax-wars.pdf
135 Straits Times (2016). Indonesia Tax Amnesty May Lure Home Some of S$280b Reportedly Stashed in Singapore. http://www.straitstimes.com/business/banking/indonesias-wealth-managers-bank-on-tax-amnesty-to-lure-home-some-of-s280b-reportedy
136 D. Kar and J. Spanjers (2015). Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004–2013. Global Financial Integrity. http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2004-2013/

137 Oxfam analysis of IMF Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) data shows that $101,144,469,761 was invested from Indonesia into tax havens in 2015, compared with a figure of $53,342,283,354 in 2009. https://www.imf.org/en/Data

138Anggaran pendidikan Indonesia tahun 2014 adalah sebesar IDR 129.2 trilyun. Laporan ini menggunakan konversi nilai tukar rata-rata 2014 (0.0000845, http://www.x-rates.com/average/?from=IDR&to=USD&amount=1&year=2014) dan menghasilkan angka $10.9 milyar.

139 Indonesia Investments (2016). Indonesia and the Panama Papers: Names and Numbers. http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-and-the-panama-papers-names-and-numbers/item6674

140 J. Lu (2017) Indonesia resolves to tackle inequality in 2017 http://www.humanosphere.org/basics/2017/01/indonesia-resolves-tackle-inequality-2017/

141 APBN (2017) Catatan Anggaran Pemerintah http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/NK%20APBN/2016%20NK%20RAPBN%202017.pdf

142 World Bank (2015). *Indonesia's Rising Divide*, op. cit., p.22

143 O Dia (2017) *Mínimo subiu 77% acima da inflação* http://odia.ig.com.br/economia/2016-04-30/minimo-subiu-77-acima-da-inflacao.html

144 World Bank (2015). *Indonesia's Rising Divide*, op. cit., p.22.

145 D. Phillips (2016) *Brazil Senate Approves Austerity Package to Freeze Social Spending for 20 Years* https://www.theguardian.com/world/2016/dec/13/brazil-approves-social-spending-freeze-austerity-package

146 Siaran Pers dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

147 J. Lu (2017) *Indonesia resolves to tackle inequality in 2017* http://www.humanosphere.org/basics/2017/01/indonesia-resolves-tackle-inequality-2017/

148 Jakarta Post Newsdesk (2017) *Gini Ratio Slightly Down in September: Central Statistics Agency* http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/03/gini-ratio-slightly-down-in-september-central-statistics-agency.html

149 Saat ini, pajak pendapatan atas tanah sebesar 2.5 persen diberlakukan, namun tingkatnya jarang direvisi untuk mencerminkan nilai pasar. - J. Lu (2017) *Op. Cit.*

150 World Bank (2015). *Taxes & Public Spending in Indonesia: Who Pays and Who Benefits?*, op. cit.

151 Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017)Anggaran Pemerintah 2017 (APBN) http://www.kemenkeu.go.id/en/node/52462

152 IndustriALL (2015). Thousands of Workers Rally for New Wage in Indonesia. http://www.industriall-union.org/thousands-of-workers-rally-for-new-wage-in-indonesia

153 Asean Trade Union Council (2016). Indonesia Promotes Asean Minimum Wage. http://aseantuc.org/2016/06/indonesia-promotes-asean-minimum-wage/

154 N. Spykerman (2016). Malaysia to Raise Minimum Wage in July. http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/05/02/malaysia-to-raise-inimum-wage-in-july.html

155 Tempo.co (2016). Wakil Presiden Jusuf Kalla Mengusulkan Upah Minimum ASEAN. http://en.tempo.co/read/news/2016/06/02/056776080/VP-Jusuf-Kalla-Proposes-ASEAN-Minimum-Wage

156 M. Brown (2016). Indonesia Promotes ASEAN Minimum Wage. ASEAN Briefing. http://www.aseanbriefing.com/news/2016/06/06/indonesia-promotes-asean-minimum-wage.html

157 Oxfam (2016). Underpaid and Undervalued: How inequality defines women's work in Asia. http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/underpaid-and-undervalued-how-inequality-defines-womens-work-in-asia-611297

158 Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

159 ILOSTAT. Summary Tables, op. cit.

160 Close the Gap. Closing the Pay Gap: Roles for Stakeholders. https://www.closethegap.org.uk/content/gap-closing/

161 European Commission (2016). Why is it Important to Tackle the Gender Pay Gap? http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/tackle/index_en.htm

162 Interactions, Unpaid Care Work in Indonesia http://interactions.eldis.org/unpaid-care-work/country-profiles/indonesia

163 Bloomberg (2015). *'Dangerous' Inequality Spurs Widodo's Indonesia Shakeup*, op. cit.

164F.S. Sundaryani and I. Parlina (2017) *Jokowi Pledges to Close Inequality Gap in 2017* http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/05/jokowi-pledges-to-close-inequality-gap-in-2017.html

165 IMF (2011). Indonesia: Selected Issues. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11310.pdf

166 Tahun 2015, Indonesia menjaring pendapatan pajak sebesar IDR 1.056 kuadrilion, dengan rasio pajak terhadap PDB 12 persenhttp://www.thejakartapost.com/news/2016/01/12/behind-tax-shortfall-rethinking-indonesian-taxation.html). Dengan menggunakan rasio 21,5 persen jumlahnya pajak yang seharusnya bisa diraih adlaah IDR 1.892 kuadrilion. Perbedaan antara kedua angka ini adalah IDR 836 trilyun. NIlai USD menggunakan rata-rata nilai tukar untuk tahun 2015 (http://www.x-rates.com/average/?from=IDR&to=USD&amount=1&year=2015) sebesar 0.000075.

167 Oxfam (2017, akan terbiy) Commitment to Reducing Inequality Index. Health spending is currently 1 percent of GDP. If the tax-to-GDP ratio were increased from below 12 percent now to 21.5 percent, this could increase the health budget by nine times.

168 Indonesia Investments (2015) Government of Indonesia to Cut Personal and Corporate Income Tax http://www.indonesia-investments.com/finance/financial-columns/government-of-indonesia-to-cut-personal-corporate-income-tax/item6152?

169 https://www.gov.uk/income-tax-rates/current-rates-and-allowances, https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2011/12/belgium-income-tax.html, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800

170 A.B. Atkinson (2015). Inequality – What Can Be Done? LSE International Inequalities Institute. http://www.lse.ac.uk/InternationalInequalities/pdf/III-Working-Paper-2-TAtkinson.pdf

171 T. Piketty (2015). Capital and Wealth Taxation in the 21st Century. National Tax Journal, June 2015, 68 (2), 449-458. http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2015NTJ.pdf

172 Iran, the Philippines, Thailand and Vietnam all have some form of inheritance tax.

173 Institusi yang lebih dan keterbatasan kapasitas membuat sulit untuk memperkirakan dan menetapkan pajak kekayaan.

174 Pajak mempengaruhi kurang dari 10,000 penduduk dan dapat memobilisasi antara $28 juta dan $56 juta tiap tahun. . Global Legal Monitor (2016). Thailand: First Inheritance Tax in Decades Comes Into Force. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/thailand-first-inheritance-tax-in-decades-comes-into-force/

175 A. Cole (2015) Estate and Inheritance Taxes Around the World, Tax Foundation https://taxfoundation.org/estate-and-inheritance-taxes-around-world/

176 B. Brys, et al. (2016) Tax design for Inclusive Economic Growth, OECD Taxation Working Papers, No. 26, OECD Publishing, Paris http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-design-for-inclusive-economic-growth_5jlv74ggk0g7-en?crawler=true

177 Deloitte (2016) Indonesian Tax Guide 2016 https://www2.deloitte.com/id/en/pages/tax/articles/indonesian-tax-guide-2016.html

178 Jakarta Globe (2017) Govt Releases Policy Package to Improve Welfare and Reduce Inequality http://jakartaglobe.id/business/govt-releases-policy-package-to-improve-welfare-and-reduce-inequality/

179 Reuters (2016). Google May Face Over $400 Million Indonesia Tax Bill for 2015 – Government Official. http://www.reuters.com/article/us-indonesia-google-idUSKCN11P0PC

180 A. Suharmoko (2008). 'Sunset Policy' Program Extended Until February. The Jakarta Post. http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/31/039sunset-policy039-program-extended-until-february.html

181 K. Salnis (2016). Jokowi Amnesty Favors Tax Cheats and Punishes Payers, OECD Says, op. cit.

182 H. Suhartono (2016). Indonesia Mulls Devloping Tax-Haven Areas to Lure Investment. Bloomberg. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-14/indonesia-mulls-developing-tax-haven-areas-to-lure-investment

183 Indonesia Investments (2016).Corporate Income Tax Indonesia To Be Cut in 2017?, op. cit.

184 OECD (2002). International Investment Perspectives 2002. http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/international-investment-perspectives-2002_iip-2002-en; OECD (2008). Tax Effects on Foreign Direct Investment. Policy Brief; UNCTAD (2000). Tax Incentives and Foreign Direct Investment; A Global Survey. http://unctad.org/en/Docs/iteipcmisc3_en.pdf

185 PRAKARSA Policy Review (2015). Anticipating Tax War in the ASEAN Economic Integration Era, op. cit.

186 E. Berkhout (2016) Tax battles: The Dangerous Global Race to the Bottom on Corporate Tax. Oxfam. http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/tax-battles-the-dangerous-global-race-to-the-bottom-on-corporate-tax-620159

187 A. Hermansyah (2016) Corporate income tax cut not imminent: Government http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/17/corporate-income-tax-cut-not-imminent-government.html

188 E. Berkhout (2016) Op cit. http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/tax-battles-the-dangerous-global-race-to-the-bottom-on-corporate-tax-620159

189 OECD (2013). Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf

190 Tax Justice Network (2015). 10 Reasons Why an Intergovernmental UN Tax Body Will Benefit Everyone. http://www.taxjustice.net/2015/06/19/10-reasons-why-an-intergovernmental-un-tax-body-will-benefit-everyone/
191 UN Sustainable Development Goals (2015). Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
192 O. O'Donnell et al. (2007). The Incidence of Public Spending on Healthcare: Comparative Evidence from Asia. The World Bank Economic Review 21(1) (January 1): 93-123. http://wber.oxfordjournals.org/content/21/1/93
193 Nonthaburi, Thailand: Health Insurance System Research Office, (2012) Thailand's Universal Coverage Scheme: Achievements and Challenges. An independent assessment of the first 10 years (2001-2010).
194 Ibid.
195 IRIN (2013). Indonesia Aims for Universal Health Care by 2019. http://www.irinnews.org/analysis/2013/03/15/indonesia-aims-universal-health-care-2019
196 Ibid.
197 Data pengamatan WHO (2014)
198 WHO Data Observatory (2014). Last accessed 1.2.2017
199 Those in formal employment pay a premium equivalent to 5 percent of their salary, with 4 percent payable by employers and 1 percent payable by employees themselves. Informal workers, the self-employed and investors pay fixed monthly premiums of between IDR 25,500 (£1.34) and IDR 59,500 (£3.12) in a tiered system of first-, second- and third-rate care depending on the contributions they choose to pay. L. Razavi (2015). Indonesia's Universal Health Scheme: One Year On, What's the Verdict? The Guardian. https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/may/15/indonesias-universal-healthcare-insurance-verdict
200 Oxfam (2013). Universal Health Coverage: Why health insurance schemes are leaving the poor behind, op. cit., pp.18-20.
201 INFID (2015) Interview dengan Ismayati dilakukan oleh INFID pada12/12/2015
202 Guerard,Y., Wiener,M., Rokx, C., Schieber, G., Harimurti, P., Pambudi, E. And A. Tandon (2011) 'Actuarial costing of universal health insurance in Indonesia: Options and preliminary results HNP Discussion Paper, The World Bank Group, Washington DC.
203 Contohnya, di Thailand, peningkatan pengeluaran untuk peralatan medis dan obat-obatan telah meramaikan kegiatan ekonomi, hingga 1.2 kali lipat dari pengeluaran. Nonthaburi, Thailand, Health Insurance System Research Office (2012) *Thailand's Universal Coverage Scheme: Achievements and Challenges, An Independent assessment of the first 10 years Synthesis report (2001-2010)*
204OECD/Asian Development Bank (2015), Education in Indonesia: Rising to the Challenge, OECD Publishing, Paris, page 19, http://dx.doi.org/10.1787/9789264230750-en
205 Interview INFID dengan Abduhzen, 26 August 2016.
206 UNESCO (2014) *UNESCO Education Strategy 2014-2021* http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf p.27
207 Global Goals (2016) *4. Quality Education* http://www.globalgoals.org/global-goals/quality-education/ Goal 4, Target 1: Pada tahun 2010: memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang bebas biaya, setara dan bermutu yang bertujuan untuk memenuhi Goal 4 tentang capaian pembelajaran efektif dan lain yang relevan.
208 UNESCO (2016) *Education for people and Planet: Containing Sustainable Futures for All* http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf, p.183
209 Bank Dunia (2015). *Indonesia's Rising Divide*, hal.8. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide, p.65
210 Ibid.
211 UNDP (2015) *Human Development Report 2015 – Indonesia Country Brief* http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/IDN.pdf
212 The Jakarta Post (2013) *Majority of Disabled Lack Access to Education* http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/19/majority-disabled-lack-access-education.html
213 CSO Consortium (2016). Policy Notes on APBN 2017 and 2018, op. cit.
214 A. Amindoni (2016) Indonesia to Start 10 Vocational Schools this Year http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/20/indonesia-to-start-10-vocational-schools-this-year.html
215 Symonds, William C., Robert Schwartz, and Ronald F. Ferguson. (2011) Pathways to prosperity: Meeting the challenge of preparing young Americans for the 21st century. Cambridge, MA: Pathways to Prosperity Project, Harvard University Graduate School of Education https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4740480/Pathways_to_Prosperity_Feb2011-1.pdf?sequence=1

216 UNESCO (2012). General Versus Vocational Education: Some New Evidence from PISA 2009. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002178/217873e.pdf

217 Pemerintah mengandalkan skema KIP sebagai instrument utama untuk membuka akses atas pendidikan yang lebih besar bagi siswa-siswa sekolah dasar dan menengah. Dalam skema ini, anak-anak usia 6-21 yang memiliki KIP atau berasal dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), berhak untuk mendapatkan bantuan pendidikan ketika mereka terdaftar di sekolah formal maupun sekolah kejuruan. Skema ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran di sekolah dasar dan menengah, menurunkan tingkat putus sekilah, dan menurunkan ketimpangan pendidikan antara kelompok (kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, serta perkotaan dan pedesaan).

218 World Economic Forum (2016). Is This The Answer To Youth Unemployment in East Asia? https://www.weforum.org/agenda/2016/05/youth-unemployment-in-east-asia/

© Oxfam International Februari 2017

Laporan ini ditulis oleh Luke Gibson dengan kontribusi dari Dini Widiastuti, Andhika Maulana, Siti Khoirun Nikmah, Sugeng Bahagijo, Nezar Patria, Maria Dolores Bernabe, Deborah Hardoon, Nick Galasso, Didier Jacobs, Anna Marriott, Chiara Mariotti dan Mohga Kamal-Yanni.Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian publikasi yang ditulis sebagai masukan untuk diskusi publik tentang masalah kebijakan pembangunan dan kemanusiaan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai berbagai masalah yang diangkat dalam paper ini, silakan kirim email ke advocacy@oxfaminternational.org

Penerbitan ini merupakan hak cipta yang dilindungi undang-undang, namun teks-nya dapat digunakan secara cuma-cuma untuk keperluan advokasi, kampanye, pendidikan, dan penelitian, dengan catatan mencantumkan sumbernya secara penuh. Pemegang hak cipta menghimbau agar setiap penggunaan publikasi ini dilaporkan kepada mereka untuk kepentingan penilaian dampak. Salinan yang dibuat dalam kondisi lainnya, atau untuk penggunaan kembali dalam publikasi lain, atau untuk terjemahan atau adaptasi, harus dengan seizin pemegang hak cipta yang kemungkinan dapat dikenakan biaya. Email policyandpractice@oxfam.org.uk

Informasi dalam penerbitan ini benar adanya pada saat masuk proses percetakan.

Diterbitkan oleh Oxfam GB untuk Oxfam International di bawah ISBN 9780-0-85598-898-2 Februari 2017. Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.

OXFAM

Oxfam adalah konfederasi internasional dari 18 badan afiliasi dan 2 organisasi pengamat yang berjejaring bersama di antara lebih dari 90 negara, sebagai bagian dari pergerakan global untuk perubahan, untuk membangun masa depan yang bebas dari kemiskinan sebagai bentuk ketidakadilan. Silakan menulis ke salah satu lembaga berikut ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, atau kunjungi www.oxfam.org

Oxfam America (www.oxfamamerica.org)
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)
Oxfam-in-Belgium (www.oxfamsol.be)
Oxfam Canada (www.oxfam.ca)
Oxfam France (www.oxfamfrance.org)
Oxfam Germany (www.oxfam.de)
Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)
IBIS (Denmark) (www.ibis-global.org)
Oxfam India (www.oxfamindia.org)
Oxfam Intermón (Spain) (www.intermonoxfam.org)
Oxfam Ireland (www.oxfamireland.org)
Oxfam Italy (www.oxfamitalia.org)
Oxfam Japan (www.oxfam.jp)
Oxfam Mexico (www.oxfammexico.org)
Oxfam New Zealand (www.oxfam.org.nz)
Oxfam Novib (Netherlands) (www.oxfamnovib.nl)
Oxfam Québec (www.oxfam.qc.ca)
Oxfam South Africa

Observer:

Oxfam Brasil (www.oxfam.org.br)

www.oxfam.org

infid International NGO Forum on Indonesian Development

OXFAM